



**WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 38 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
KOTA SABANG TAHUN 2023-2027**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Sabang Tahun 2023-2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA SABANG TAHUN 2023 – 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut Renaksi Penerapan SPM adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan standar pelayanan minimal.
2. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
3. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

5. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
6. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
7. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatandengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kota.
15. Pemerintah Kota Sabang adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sabang.
18. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Sabang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data;
- b. integrasi SPM;
- c. strategi Penerapan SPM;
- d. pembiayaan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB III PENDATAAN, PEMUTAKHIRAN DAN SINKRONISASI DATA

Pasal 3

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik.
- (2) Pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi data dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.
 - b. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia dan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
 - c. jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang tersedia.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk format pengumpulan data terhadap urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam proses penyusunan Renaksi Penerapan SPM.
- (5) Pemutakhiran dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui verifikasi data dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan catatan sipil dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB IV INTEGRASI STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 4

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar memprioritaskan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam dokumen RPJMD, Renstra PD, RKPD dan Renja PD.
- (3) Bappeda memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar terintegrasi ke dalam dokumen RKPD dan Renja PD.

Pasal 5

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan mengintegrasikan SPM ke dalam dokumen APBK.
- (2) Bappeda dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah memastikan Program, Kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan Pelayanan Dasar dalam dokumen RKPD dan Renja PD terintegrasi ke dalam APBK dan memastikan tercatat sampai ke dalam dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.

BAB V

STRATEGI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 6

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dan melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan mengoordinasikan perumusan strategi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar.
- (3) Inspektorat mengoordinasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Perumusan strategi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk periode 5 (lima) tahun.
- (5) Tim Penerapan SPM melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pertemuan atau rapat koordinasi secara berkala setiap triwulan;
 - b. bimbingan teknis Penerapan SPM;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan
 - d. konsultasi Penerapan SPM.
- (6) Sistematika Renaksi Penerapan SPM memuat:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - c. BAB III : Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM;
 - d. BAB IV : Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan SPM; dan

e. BAB V : Kesimpulan dan Saran.

- (7) Renaksi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran Per: (7) Renaksi ... ini.

Pasal 7

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
- (2) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyampaikan strategi dan rencana Program dan Kegiatan pemenuhan SPM pada tahun anggaran berjalan dan tahun berikutnya.
- (3) Sosialisasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika melalui pemanfaatan media lokal yang mudah diakses masyarakat dan forum-forum kemasyarakatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi dan konsolidasi sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.
- (3) Sekretaris Daerah memprioritaskan pembiayaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal APBK tidak mencukupi pembiayaan Penerapan SPM, tim Penerapan SPM mengupayakan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (5) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib terkait Pelayanan Dasar dapat menganggarkan pembiayaan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Sekretaris Daerah dapat mengupayakan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama dengan daerah lain, kerja sama dengan pihak ketiga, kerja sama dengan badan usaha, mengusulkan pembiayaan dari APBN dan upaya lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Tim Penerapan SPM mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap triwulan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan Penerapan SPM tahun berikutnya.

Pasal 10

- (1) Tim Penerapan SPM menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Kota Sabang yang terintegrasi.
- (2) Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Tata Pemerintahan dan dikonsolidasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hubungan masyarakat dan dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Tim Penerapan SPM melakukan koordinasi pencapaian berdasarkan laporan Penerapan SPM.
- (2) Bagian Tata Pemerintahan melakukan analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada triwulan empat.
- (3) Hasil analisis laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai rekomendasi kebijakan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Pemerintahan melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama di tingkat pusat melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
- (2) Laporan Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara triwulan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 20 November 2023

PJ. WALI KOTA SABANG,



Diundangkan di Sabang
pada tanggal 20 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ANDRI NOURMAN

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2023 NOMOR 38

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL KOTA SABANG
TAHUN 2023-2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan urusan wajib pelayanan dasar dengan prinsip otonomi yang dilaksanakan secara nyata dan bertanggungjawab.

Penanganan urusan pemerintahan tersebut dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dengan melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sejalan dengan tujuan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu bentuk perwujudan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah dengan menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal, namun terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar, kriteria penetapan SPM, dan mekanisme penerapan SPM.

SPM diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Sabang menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran

Maksud penyusunan Renaksi Penerapan SPM adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran SPM setiap tahun, memastikan program, kegiatan dan sub kegiatan penerapan SPM tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, langkah-langkah konkrit dalam pemenuhan SPM dan alat melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan SPM di daerah.

Renaksi ini bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Sabang dalam mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik.

1.3. Kondisi Umum Wilayah

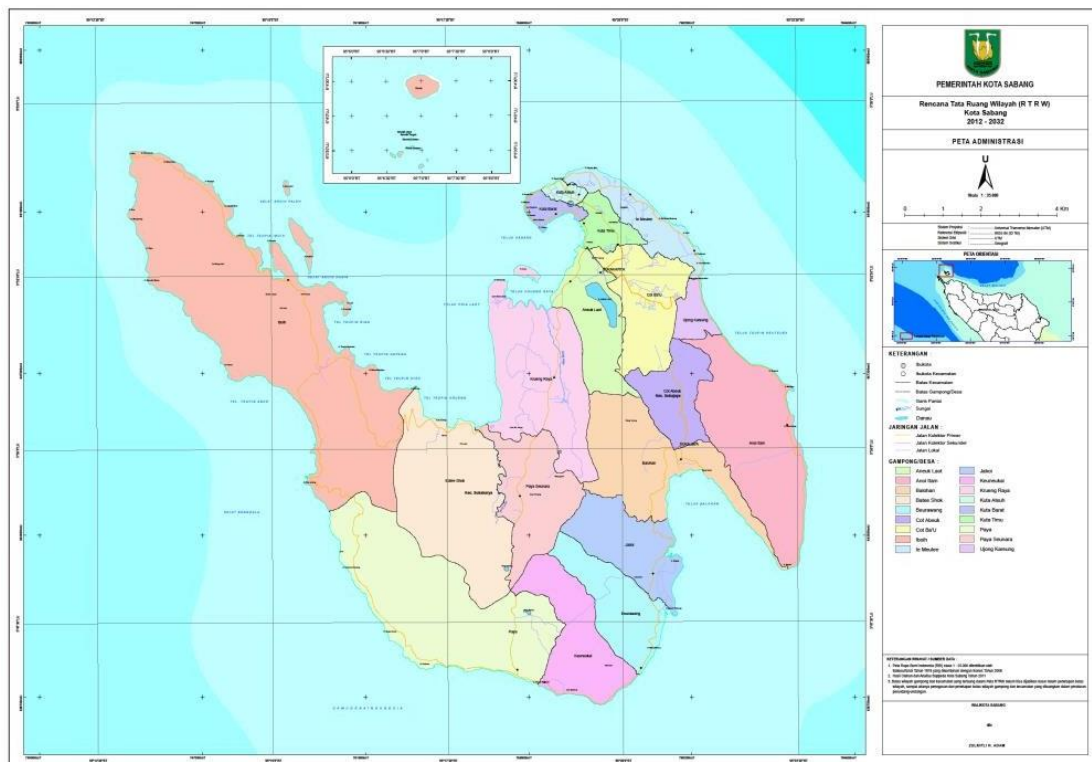
2.2.1. Luas Wilayah dan Batas Wilayah

Posisi Kota Sabang secara geografis berada pada posisi 05°46'28"-05°54'28" Lintang Utara (LU) dan 95°13'02"-95°22'36" Bujur Timur (BT) dengan luas wilayah mencapai 12.213,97 Ha dan ketinggian rata-rata ± 28 m di atas permukaan laut (dpl), memiliki beberapa pulau yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako dan Pulau Rondo (Pulau terluar Indonesia di sebelah barat), serta gugusan pulau kecil yaitu Pulau Batu Kembar, Batu Runcing, Batu Tengah, Batulah Selatan, Batulah Tengah dan Batulah Utara. Namun pusat pemerintahannya sendiri berada di Pulau Weh.

Sedangkan batas-batas wilayah Kota Sabang antara lain sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Benggala;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Gambar 1.1
PETA WILAYAH ADMINISTRASI KOTA SABANG



Secara administrasi Kota Sabang terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Sukakarya, Kecamatan Sukajaya dan Kecamatan Sukamakmue. Kecamatan Sukamakmue merupakan kecamatan baru

yang dibentuk berdasarkan Qanun Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kecamatan Sukamakmue. Kota Sabang terdiri dari 7 (tujuh) mukim serta 18 (delapan belas) Gampong dengan pembagian kecamatan menurut luas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.1
LUAS DAN PERSENTASE WILAYAH KECAMATAN DI KOTA SABANG

No	KECAMATAN	GAMPONG		LUAS (Ha)
1	2	3		4
A.	Kecamatan Sukakarya	No.	Nama Gampong	
		1	Gampong Kuta Ateuh	52,04
		2	Gampong Kuta Timu	157,11
		3	Gampong Kuta Barat	88,86
		4	Gampong Aneuk Laot	449,67
B.	Kecamatan Sukajaya	No.	Nama Gampong	
		1	Gampong Ie Meulee	306,89
		2	Gampong Ujong Kareung	122,60
		3	Gampong Anoi Itam	1.018,89
		4	Gampong Cot Ba'u	531,09
		5	Gampong Abeuk	357,18
		6	Gampong Balohan	772,41
7	Gampong Jaboi	490,14		
C.	Kecamatan Sukamakmue	No.	Nama Gampong	
		1	Gampong Beurawang	469,32
		2	Gampong Keunekai	568,96
		3	Gampong Paya	1.444,64
		4	Gampong Paya Seunara	564,23
		5	Gampong Batee Shoek	1.129,51
		6	Gampong Iboih	2.731,16
Total Luas Kota Sabang				12.213,97

Sumber: Bappeda Kota Sabang

2.2.2. Topografi

Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian ± 28 m di atas permukaan air laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh pergunungan, yakni sekitar 48,17% dari luas kawasan keseluruhan. Sedangkan secara lebih rinci topografi Kota Sabang meliputi dataran 1,01%, landai sampai datar 6,12%, bergelombang 30,69%, bergunung 48,17%, sangat curam 14,01%. Kondisi daerah yang datar relatif terbatas, yaitu hanya di sekitar pantai, Bandara Maimun Saleh dan Gampong Paya Seunara. Di dalam rencana pengembangan kota harus dicarikan berbagai alternatif untuk pemanfaatan lahan yang berbukit, misalnya untuk pertanian atau perkebunan.

Kemiringan lereng yang dijumpai pada Pulau Weh sangat dipengaruhi oleh adanya struktur geologi yang ada, akibat adanya pelurusan-pelurusan yang berarah relatif barat laut-tenggara maka punggung-punggungan yang dijumpai juga berarah relatif tenggara-barat daya. Kemiringan lereng yang kurang dari 15 % ditemukan pada kawasan pesisir dan pada perpotongan dua kelurusan yang akhirnya membentuk suatu dataran pantai serta secara otomatis merupakan muara sungai.

Pada daerah dataran ini dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman dan juga sarana infrastruktur pendukung lainnya.

Secara geologi daerah ini tersusun oleh endapan yang berumur kuartar berupa endapan muara sungai dan endapan pasir pantai. Kemiringan lereng antara 15-30% sebagaimana ke dua pulau lainnya

menempati pada daerah yang terluas yang berupa perbukitan yang secara geologi tersusun oleh batuan vulkanik yang berumur sebelum Kuartar. Sedangkan daerah yang mempunyai kemiringan lereng lebih dari >30% menempati bagian lembah kelurusan yang ada.

2.2.3. Hidrologi

Sumber daya air di Kota Sabang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Sungai-sungai yang terdapat di pulau Weh umumnya memiliki ukuran relatif kecil dan pendek. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada di Sabang adalah sub DAS Aneuk Laot, Sub DAS Anoe Itam, Sub DAS Ceuhum, Sub DAS Gua Sarang, Sub DAS Iboih, Sub DAS Paya Seunara, Sub DAS Pria Laot, Sub DAS Teupin Kareung dan Sub DAS Ujong Ba'u.

Meskipun Kota Sabang memiliki beberapa sumber air bersih, namun demikian debitnya yang relatif kecil dan topografi pulau weh yang bergelombang menyebabkan tidak semua wilayah di Kota Sabang mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Aneuk Laot.

2.2.4. Demografi

Secara umum, jumlah penduduk di Kota Sabang di tahun 2020 menurut data Kependudukan dan Pencatatan Sipil mencapai 42.698 jiwa. Jumlah penduduk di Kota Sabang terus meningkat. Menurut kecamatan, jumlah penduduk paling tinggi berada di Kecamatan Sukajaya (20.164 jiwa) selanjutnya yaitu Kecamatan Sukakarya (13.859 jiwa) dan Kecamatan Sukamakmue (8.673 jiwa). Tinggi atau rendah jumlah penduduk di Kota Sabang lebih dipengaruhi oleh pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, baik kawasan perumahan dan perdagangan jasa.

Jumlah Penduduk Kota Sabang sampai dengan akhir tahun 2021 berjumlah 42.559 jiwa yang terdiri dari laki-laki 21.469 jiwa dan perempuan 21.090 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 12.679.

Untuk Tahun 2022 Jumlah Penduduk Kota Sabang adalah 42.867 jiwa yang terdiri dari laki-laki 21.574 jiwa dan perempuan 21.293 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 12.726, dengan rincian sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN DI KOTA SABANG
TAHUN 2022

NO.	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Sukajaya	10.224	10.104	20.336
2.	Sukakarya	6.931	6.799	13.730
3	Sukamakmue	4.419	4.352	8.771
JUMLAH		21.576	21.293	42.867

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang

2.2.5. Kawasan Rawan Bencana

1. Gempa Bumi

Berdasarkan Pusat Survei Geologi Pulau Weh merupakan daerah yang rawan terhadap guncangan gempa bumi. Berdasarkan catatan yang ada Pulau Weh pernah mengalami

gempa bumi dengan besaran magnitude 6-7 skala richter dan dalam peta wilayah rawan bencana bumi Indonesia, Kota Sabang dan sekitarnya masuk ke dalam skala V-VI MMI (*Modifield Mercaly Intensity*).

2. Tanah Longsor

Kondisi tanah pada beberapa tempat di Kota Sabang kurang stabil. Hal ini diakibatkan karena struktur geologinya merupakan hasil letusan gunung api yaitu tufa andesit. Jenis batuan ini sifat fisiknya kurang baik, yaitu tidak memberikan tahanan dalam menerima tekanan. Selain itu struktur tanahnya cenderung terjadi perubahan sehingga mudah longsor. Bencana Rawan Gelombang Pasang

3. Abrasi

Dampak dari tsunami telah merusak ekosistem vegetasi yang ada di Pulau Weh. Pantai di Kota Sabang seperti Pantai Sabang, Pantai Iboih, Pantai Sabang *Fair*, dan Pantai Jaboi, kondisinya adalah tergolong pantai yang landai dengan kelerengan kurang dari 2°. Material pantai terdiri dari pasir, pasir lanauan sampai berukuran lempung (*Clay*). Pantai-pantai yang teramati yaitu Pantai Iboih, Pantai Sabang Fair dan Pantai Jaboi termasuk pantai-pantai yang berpotensi terjadinya abrasi.

4. Angin

Kota Sabang mengalami dua musim angin yaitu Angin Barat dan Angin Timur. Musim Angin Barat terjadi bulan November sampai Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu relatif rendah dan curah hujan yang paling tinggi. Musim Timur terjadi pada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah Timur kearah Barat dan Barat Daya. Pada bulan-bulan Musim Timur rata-rata suhu udara di Kota Sabang bersekitar antara 26,40 0C sampai dengan 28,70 0C. Kelembaban nisbi rata-rata di Kota Sabang bersekitar antara 84% sampai dengan 89%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin rata-rata dengan kecepatan tertinggi dan berpotensi terjadinya puting beliung.

2.2.6. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Rata-rata laju pertumbuhan tahun 2022 sebahagian besar menurun, laju pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha informasi dan komunikasi sekitar 8,40%. Sektor ini sangat berperan dalam kondisi pandemi Covid-19, semua aktivitas

melalui daring baik aktifitas lingkungan pendidikan, pemerintahan serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Sedangkan laju pertumbuhan lapangan usaha terendah pada sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar -14,11%. Ini diakibatkan pembatasan kunjungan wisatawan ke Kota Sabang selama Pandemi Covid-19.

Kondisi ekonomi makro selama enam tahun terakhir (tahun 2017–2022) menunjukkan kinerja yang signifikan jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan *output agregat* (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) kecuali tahun 2022. Meskipun menurun, namun LPE Kota Sabang masih diatas LPE Nasional dan dibawah Prov. Aceh dan PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.

Sabang cenderung naik dan LPE Provinsi Aceh cenderung berfluktuatif, sedangkan LPE Nasional cenderung mengalami penurunan, dan kembali membaik pada tahun 2016 dan 2018. Khusus Tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 pertumbuhan turun di semua level, dan mengalami peningkatan di tahun 2021 dan mengalami penurunan di 2022.

Laju pertumbuhan PDRB Kota Sabang tahun 2022 turun mencapai -1,15%, sedikit jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2019 dengan pertumbuhan 5,82%. Pada tahun 2022, dari 17 kategori ekonomi, hanya 7 kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Sepuluh kategori lainnya mengalami pertumbuhan negatif. Hal tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai sektor dan daerah, khususnya Kota Sabang.

Laju pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 23,41% akibat semakin tingginya pemanfaatan alat komunikasi dan informasi semasa pandemi Covid-19. Selanjutnya kegiatan kesehatan dan sosial menyumbang 4,85% akibat banyaknya dampak pandemi Covid-19 dan aktifitas sosial untuk mengatasi kerawanan sosial.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kota Sabang digunakan pendekatan teori *Gini Ratio* yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio *Gini* antara 0–1 (>0 dan <1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- $0,00 < G < 0,35 \rightarrow$ pemerataan tinggi/ketimpangan rendah;
- $0,35 < G < 0,50 \rightarrow$ pemerataan/ketimpangan sedang/moderat; dan
- $G > 0,50 \rightarrow$ pemerataan rendah/ketimpangan tinggi.

Semakin indeks *Gini* mendekati angka 0, maka dapat diartikan bahwa pemerataan semakin baik. Sebaliknya, apabila indeks *Gini* semakin mendekati angka 1 maka dapat

disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan di dalam masyarakat semakin besar.

Tabel 2.6
KETIMPANGAN PENDAPATAN RATIO TAHUN 2018-2022

INDIKATOR	TAHUN				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Ketimpangan Pendapatan Ratio	0,277	0,281	0,271	0,293	0,298

Sumber: BPS Kota Sabang, 2022

Tiga hal yang mempengaruhi tingginya rasio *Gini*. Pertama, *unequal opportunity*, yakni kesempatan yang tidak sama bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Kedua, pasar tenaga kerja yang tidak seimbang, yakni pekerja informal bergaji sangat minim, sedangkan pekerja formal memiliki gaji 'selangit'. Ketiga, distribusi kekayaan yang tidak merata.

Tren Rasio *Gini* di Kota Sabang semakin baik, pada tahun 2015 Rasio *Gini* Kota Sabang adalah sebesar 0,271. Pada tahun 2016 naik menjadi 0,299. Tahun 2017 Rasio *Gini* turun menjadi 0,247 dan tahun 2018 sampai 2019 kembali naik dengan nilai masing-masing 0,277 dan 0,281. Tahun 2020 Rasio *Gini* kembali turun menjadi 0,271, pada tahun 2021 adalah 0,293 dan pada tahun 2022 adalah 0,298. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penurunan gap/kesenjangan yang menyempit dalam perekonomian penduduk di Kota Sabang yang harus dipertahankan atau terus diperkecil. Turunnya Rasio *Gini* ini terjadi sebagai dampak dari tersedianya program jaring pengaman sosial, seperti adanya bantuan gas dan listrik bagi KK miskin, bantuan pendidikan, bantuan kematian, bantuan bagi balita (geunaseh), kartu sehat, kartu pintar, yang sangat mempengaruhi turunnya angka Rasio *Gini* di Sabang.

1.4. Tugas dan Fungsi Tim Penerapan SPM

Renaksi Penerapan SPM Daerah disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan pada capaian penerapan SPM pada Tahun sebelumnya (N-1) dalam pelaksanaannya tim penerapan SPM melakukan serangkaian proses perencanaan strategi yang dirumuskan dengan mempertimbangan isu-isu strategis dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan capaian SPM yang harus dihadapi selama pelaksanaan penerapan SPM. Strategi tim penerapan SPM dalam menyusun Renaksi Penerapan SPM Daerah harus memperhatikan faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkup ekologi/lingkungan pembangunan di Kota Sabang yang mempengaruhi tidak tercapainya sasaran capaian SPM. Pendekatan yang digunakan oleh tim Penerapan SPM dalam merumuskan Renaksi Penerapan SPM Daerah adalah dengan membuat inisiasi yang berisi solusi dan inovasi yang dapat diterapkan oleh tim Penerapan SPM dalam upaya memperbaiki capaian, sehingga rumusan strategi Renaksi Penerapan SPM Daerah yang disusun merupakan rangkaian hubungan yang saling berpengaruh antara kekuatan, kelemahan, dan peluang serta ancaman yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menerapkan SPM di daerah masing-masing.

Seiring dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah menerbitkan Peraturan

Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 harus dipedomani oleh setiap pemerintah daerah dalam pelaksanaan penerapan SPM baik Provinsi maupun Kota/Kota.

BAB II
KONDISI DAN PERMASALAHAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

2.1. Kondisi Pemenuhan Penerapan SPM

Program Prioritas Pemenuhan SPM sesuai dengan telaah terhadap Rencana Strategis, dalam Rencana Strategis Kota Sabang 2022-2024 terdapat beberapa fokus dalam urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

2.2.1. Bidang Pendidikan

Tabel 2.1 Kondisi Capaian SPM Bidang Pendidikan di Kota Sabang Tahun 2022

Kota/ Kota	SPM Bidang Pendidikan Kota/Kota										
	Pendidikan Anak Usia Dini			Pendidikan Dasar			Pendidikan Kesetaraan			Pagu Anggaran SPM(Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Usia 05 (Lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Anak Usia Dini			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Dasar			Usia 7 (Tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk Jenis Pelayanan Dasar pendidikan Kesetaraan				
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kota Sabang	1.682	902	53,6%	7.702	5.992	77,8%	2.291	77	3,3%	61.493.425.181	57.162.096.700

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.2. Bidang Kesehatan

Tabel 2.2 Kondisi Capaian SPM Bidang Kesehatan di Kota Sabang Tahun 2022

Kab/ Kota	SPM Bidang Kesehatan (Kota)																				
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pelayanan Kesehatan Balita			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif			Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut		
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Kota Sabang	809	700	86,5	772	618	80	735	615	83,6	3.859	1.571	40,7	7.083	6.317	89,1	6.940	2.371	34,1	7.073	700	84,7

SPM Bidang Kesehatan (Kota)															Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat			Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkolosis			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) Yang Bersifat Peningkatan/ Promotif dan Pencegahan/Preventif.				
Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Total Pagu Anggaran	Total Realisasi Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25.539	19.299	41,1	25.539	19.299	41,1	161	161	100	82	28	34,1	809	494	61	24.135.155.620	1.946.933.043

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.3. Bidang Pekerjaan Umum

Tabel 2.3 Kondisi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Sabang Tahun 2022

Kota/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari			Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kota Sabang	7.500	6.979	93	7.500	206	2,7	8.432.701.443	3.517.303.638

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.4. Bidang Perumahan Rakyat

Tabel 2.4 Kondisi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat di Kota Sabang Tahun 2022

Kota/ Kota	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Daerah Kota/Kota			Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kota/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kota Sabang	0	0	0	0	0	0	0	-

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.5. Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.5 Kondisi capaian SPM bidang trantibumlinmas di Kota Sabang Tahun 2022

Kota/ Kota	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Pelayanan Informasi Rawan Bencana			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran			Pagu Anggaran SPM	Realisasi Anggaran SPM
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kota Sabang	117	117	100	248	248	100	248	248	100	248	40	14	20	3	15	15.930.840.329	2.889.147.939

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2.6. Bidang ...

2.2.6. Bidang Sosial

Tabel 2.6 Kondisi capaian SPM bidang sosial di Kota Sabang Tahun 2022

Kota/ Kota	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Diluar Panti			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti			Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kota/Kota			Pagu Anggaran SPM (Rp)	Realisasi Anggaran SPM (Rp)
	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)	Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Orang Terlayani	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kota Sabang	38	3	7,8	16	2	12,5	10	1	10	2	2	100	327	327	100	669.694.304	345.912.616

Sumber: Laporan SPM Daerah

2.2. Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM

Dalam pencapaian penerapan SPM di Kota Sabang ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

2.2.1. Pendidikan

Bidang Pendidikan di Kota Sabang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Akan tetapi, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- a. belum optimalnya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
- b. masih rendahnya fungsi pengawasan terhadap mutu pendidikan.
- c. belum optimalnya pengelolaan pendidikan terutama pada pendidikan usia dini.
- d. masih ada guru dengan kualifikasi pendidikan di bawah S-1/D-4 terutama pada jenjang pendidikan sekolah dasar.
- e. belum optimalnya pelaksanaan pendidikan inklusif.
- f. belum optimalnya akses, mutu dan kualitas pendidikan yang berdaya saing.
- g. kecenderungan penurunan Angka Partisipasi Sekolah (APS) jenjang pendidikan Dasar.
- h. rasio guru PAUD terhadap murid menurun.

2.2.2. Kesehatan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan wajib pelayanan dasar bidang Kesehatan yang telah dilaksanakan, masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- a. promosi pola hidup sehat dan prevensi kesehatan masih perlu ditingkatkan untuk deteksi dini dan eliminasi penyakit menular dan tidak menular dengan capaian Persentase Prevalensi Tuberculosis (TB) 13% per 100.000 penduduk;
- b. prevalensi penduduk malaria 0,11 per 1000 penduduk.
- c. kemampuan asupan gizi masih perlu ditingkatkan, hal ini dinyatakan dari data, yaitu:
- d. prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun berdasarkan tipe (gizi kurang dan obesitas) terus meningkat sejak tahun 2018 sebesar 2.31% menjadi 5,5% pada tahun 2020;
- e. rerata persentase balita umur 0-59 bulan menurut jenis imunisasi lengkap terus menurun sejak tahun 2015-2020 yaitu 88,15 % menjadi 61,2% tahun 2020.
- f. kualitas pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, hal ini terbaca dari target yang belum tercapai atas indikator:
- g. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 80,9%; dan
- h. angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup baru mencapai 11,3/1.000 kelahiran hidup masih lebih tinggi dari dibandingkan dengan capaian Aceh yaitu 10/1.000 kelahiran hidup.

2.2.3. Pekerjaan Umum

Penyelenggaraan bidang Pekerjaan Umum di Kota Sabang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- a. belum maksimalnya drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat hanya 7,12%;
- b. kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku belum optimal sekitar 67,98%; dan
- c. rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat sangat rendah sebesar 0,3%.

2.2.4. Perumahan Rakyat

Penyelenggaraan bidang perumahan rakyat di Kota Sabang secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- a. pada tahun anggaran 2022 tidak melaksanakan program dan kegiatan terkait pemenuhan layanan perumahan rakyat sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- b. masih adanya kawasan permukiman kumuh di sekitar pusat Kota Sabang yang diharuskan untuk direlokasi ke wilayah permukiman yang layak sesuai dengan tata ruang wilayah.

2.2.5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan bidang Trantibumlinmas di Kota Sabang

Secara umum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik, namun masih terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- a. bencana kebakaran dengan tingkat waktu tanggap/*response time rate* hanya 54,5 persen.
- b. penyusunan, implementasi dan penegakan peraturan daerah masih belum optimal.
- c. masih tingginya potensi bencana gempa bumi kategori tinggi. bencana tsunami kategori tinggi, bencana tanah longsor kategori tinggi, bencana kebakaran hutan kategori tinggi, indeks bencana gelombang ekstrim dan abrasi menempati kategori tinggi; dan
- d. masih rendahnya upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

2.2.6. Sosial

Penyelenggaraan bidang Sosial di Kota Sabang berkembang seiring waktu ke arah yang lebih baik, namun ada beberapa masalah dalam pelaksanaan pencapaian SPM, adalah sebagai berikut:

- a. penerapan sistem perlindungan sosial masih kurang tepat sasaran dan belum memanfaatkan satu basis data terpadu.
- b. pemberdayaan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial belum maksimal.
- c. kurangnya peran serta masyarakat dalam menangani masalah sosial dilingkungannya.
- d. keterlibatan dunia usaha dalam penanganan masalah sosial melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) masih kurang.

- e. belum optimalnya peran Lembaga Adat Aceh dalam kehidupan sosial masyarakat.
- f. masih lemahnya pembinaan terhadap bantuan produktif penyandang masalah kesejahteraan sosial.

BAB III STRATEGI DAN PEMENUHAN PENERAPAN SPM

Dalam memenuhi ketentuan SPM sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Kota Sabang memiliki lingkungan strategis yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut dapat mencari alternatif terbaik dalam menghadapi dan mencari solusi setiap permasalahan yang timbul secara dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Untuk mencapai pemenuhan SPM, pilihan strategi dan kebijakan yang diambil dalam menyelesaikan persoalan pemenuhan enam SPM berturut-turut digambarkan sebagai berikut:

3.1 Strategi dan Kebijakan Rencana Aksi

Strategi dan kebijakan Rencana Aksi dituangkan kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah J.o Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

3.1.1 Spm Urusan Pendidikan

Dalam penerapan dan pencapaian SPM , Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sabang melaksanakan 3 (tiga) SPM yaitu :

- a. Pendidikan anak usia dini
- b. Pendidikan dasar
- c. Pelayanan pendidikan Kesetaraan

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.1
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN PENDIDIKAN

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	Angka partisipasi sekolah PAUD	1 Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
			2 Pembangunan unit sekolah baru	unit
			3 Pembangunan ruang kelas baru	unit
			4 Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	unit
			5 Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD	unit
			6 Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan		
1	2	3	4	5		
			7	Penyediaan biaya personal peserta didik PAUD	Peserta didik	
			8	Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan	pendidik	
		Literasi dan numerasi PAUD	1	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			2	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
		Kualitas PAUD	1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			2	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Guru	
			4	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			5	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			6	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	
			7	Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Unit	
			8	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Peserta didik	
		Pertumbuhan pendidik PAUD dengan S1/D IV	1	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan tenaga kependidikan	
		Program SPM Pendidikan Dasar	Angka partisipasi sekolah (SD/SMP)	1	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
				2	Pembangunan unit sekolah baru	unit
				3	Pembangunan ruang kelas baru	unit
				4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	unit
				5	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik
				6	Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar	Peserta didik
Literasi dan numerasi (SD/SMP)	1	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan	
1	2	3	4	5	
			2	Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			3	Penyediaan Pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			4	Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/ PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			6	Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			7	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			8	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			9	Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			10	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta didik
			11	Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	Peserta didik
					Iklim (SD/SMP)
2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Satuan pendidikan			
3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan			
4	Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
5	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan			
Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Angka partisipasi sekolah (Pendidikan Kesetaraan)		1	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Peserta didik
			2	Pembangunan unit sekolah baru	Unit
			3	Pembangunan ruang kelas baru	Unit
			4	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Unit

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
			5	Pengadaan perlengkapan peserta didik	Peserta Didik
			6	Penyediaan biaya personal peserta didik kesetaraan	Peserta didik
		Iklim (Kesetaraan)	1	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan pendidikan
			2	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Satuan pendidikan
			3	Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Satuan Pendidikan
			4	Bimbingan teknis, pelatihan dan/ atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			5	Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan

3.1.2 SPM URUSAN KESEHATAN

Dalam penerapan dan pencapaian SPM, Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Sabang melaksanakan 12 (dua belas) SPM yaitu :

1. Pelayanan Kesehatan ibu hamil
2. Pelayanan Kesehatan ibu bersalin
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
4. Pelayanan kesehatan balita
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
8. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
9. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
10. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosi
11. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.2
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN KESEHATAN

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang
			2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang
			3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang
			4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Orang

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
	masyarakat	Daerah Kabupaten/ Kota	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang
			6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Orang
			7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Orang
			8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Orang
			9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Orang
			10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang
			11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang
			12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang

3.1.3 SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM , Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang, melaksanakan 2 (dua) SPM yaitu :

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
- b. Penyediaan pelayanan pengelolaan air limbah domestik

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.3
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Dokumen
			2	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Dokumen
			3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			4	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	SR
			5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Liter/Detik
			6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	SR
			8	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			9	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum	Penyelenggara SPAM
			10	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Badan Usaha

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			11 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Kelompok Masyarakat
			12 Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Unit
			13 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Unit
			14 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Penyelenggara SPAM
			15 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Unit
			16 Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Unit
			17 Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Rumah Tangga
			18 Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			19 Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	
			20 Perbaiki SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Unit
			21 Perbaiki SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Unit
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Dokumen
			3 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			4 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Rumah Tangga
			5 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rumah Tangga
			6 Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Rumah Tangga
			7 Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang
			8 Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Kelompok
			9 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit
			10 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	M ³ /Hari

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
			11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	M ³ /Hari
			12 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Orang
			13 Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Unit
			14 Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Dokumen
			15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			16 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Rumah Tangga
			17 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Dokumen

3.1.4 SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Dalam penerapan dan pencapaian SPM , Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sabang, melaksanakan 2 (dua) SPM yaitu :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.4
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			2 Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
			3 Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
			4 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Dokumen
			5 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			6 Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			2 Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen
			3 Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ha
			4 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Unit Rumah
			5 Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
			6 Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah

3.1.5 SPM URUSAN TRANTIBUM

Dalam penerapan dan pencapaian SPM, Pemerintah Kota Sabang melalui :

1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Sabang melaksanakan 1 (satu) SPM yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.5
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kasus
			2 Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Kasus
			3 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan	
1	2	3	4	5	
			4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang
			6	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
			7	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unit
			8	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Dokumen
			9	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			2	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
			3	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan
		Pengelolaan Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah aceh	1	Penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	dokumen
			2	Operasionalisasi penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	laporan
			3	Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun syariat islam	laporan
			4	Penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat islam	laporan
			5	Konsultasi, informasi dan instruksi terhadap polisi wilayahul hisbah kabupaten/kota	laporan
			6	Bimbingan teknis bagi polisi wilayahul hisbah aceh dan kabupaten/kota	laporan

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
			7	Pelaksanaan eksekusi cambuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	laporan
			8	Konsultasi dengan badan legislative, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	
			9	Pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat gampong dan mukim	laporan
			10	Pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi	Dokumen
			11	Koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan Lembaga swadaya masyarakat di bidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Laporan

2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sabang melaksanakan 4 (empat) SPM yaitu :

- Pelayanan Informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.6
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan		Satuan
1	2	3	4		5
1	Program penanggulangan bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Orang
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
			2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Orang
			3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan		
1	2	3	4	5		
			4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Unit	
			5	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Dokumen	
			6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Kawasan	
			7	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		
			8	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
			9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Dokumen	
			10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Orang	
			11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Dokumen	
			12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
				2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
				3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
		4		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang	
		5		Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan	
		6		Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Dokumen	
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			3	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
			4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	
			5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan	
			6	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	
3	Program pencegahan, penanggulangan,	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,	1	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan		
1	2	3	4	5		
	penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
			3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan	
			4	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	
			5	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	
			6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	
			7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Dokumen	
			8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	
			9	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Orang	
			10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Dokumen	
			Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
				2	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
			Investigasi Kejadian Kebakaran	1	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Dokumen
			Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Orang
		2		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan	
		3		Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Dokumen	

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan
			2 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen
			3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
			4 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Laporan

3.1.6 SPM URUSAN SOSIAL

Dalam penerapan dan pencapaian SPM , Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sabang, melaksanakan 5 (lima) SPM yaitu :

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti.
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti.
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti.
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Adapun program dan kegiatan yang mendukung tercapainya SPM dimaksud adalah :

Tabel 3.7
PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENDUKUNG TERCAPAINYA
SPM URUSAN SOSIAL

No	Program	Kegiatan	Sub kegiatan	Satuan
1	2	3	4	5
1	Program rehabilitasi sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	1 Penyediaan Permakanan	Orang
			2 Penyediaan Sandang	Orang
			3 Penyediaan Alat Bantu	Orang
			4 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Orang
			5 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang

		Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Orang
			7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang
			8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Orang
			9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Orang
			10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Orang
			11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Orang
			12	Pemberian Layanan Rujukan	Dokumen
2	Program penanganan bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1	Penyediaan Makanan	Orang
			2	Penyediaan Sandang	Orang
			3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Unit
			4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Orang
			5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Orang

3.2 Matriks Rencana Aksi Penerapan SPM

3.2.1 Renaksi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Kota Sabang 2023-2027

Tabel 3.8
RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN PENDIDIKAN KOTA SABANG 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1)	Pendidikan Anak Usia Dini	1682	Orang	1716	1716			Rp 1.329.580.260	-	APBK	Disdikbud	1887	1887			Rp 1.452.538.286	-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi sekolah	81,22	%			68,99	68,99	0	-	APBK	Disdikbud			76,74	76,74	0	-	APBK	Disdikbud
2	Pertumbuhan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi B	77,27	%			81,82	81,82	0	-	APBK	Disdikbud			86,37	86,37	0	-	APBK	Disdikbud
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV		%			92,47	92,47	0	-	APBK	Disdikbud			94,35	94,35	475,000	-	APBK	Disdikbud
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD	4,35	%			0,12	0,12	0	-	APBK	Disdikbud			1,34	1,34	0	-	APBK	Disdikbud
5	Kecukupan formasi guru ASN	0	%			0	0	0	-					-	-	0	-		
6	Indeks distribusi guru	0,71	%			0,45	0,45	0	-	APBK	Disdikbud			0,59	0,59	0	-	APBK	Disdikbud
7	Proporsi PTK bersertifikat	34,82	%			24,8	24,8	0	-	APBN	Disdikbud			33,60	33,60	0	-	APBN	Disdikbud
8	Proporsi PTK penggerak	0	%			0,01	0,01	0	-	APBN/ APBK	Disdikbud			5,01	5,01	0	-	APBN/APBK	Disdikbud
9	Pengalaman pelatihan guru		%			0	0	0	-					0	0		-		
2)	Pendidikan Dasar																		
	SD	4.808	Orang	4.904	4.904			RP 6.175.229.648	-	APBK	Disdikbud	5.002	5.002			RP 6.792.752.615	-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar	93,78	%			92,6	92,6		-	APBK	Disdikbud			94,45	94,45		-	APBK	Disdikbud
2	Angka partisipasi sekolah	99,89	%			99,9	99,9		-	APBK	Disdikbud			99,93	99,93		-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni	83,03	%			82,39	82,39		-	APBK	Disdikbud			86,79	86,79		-	APBK	Disdikbud
4	Kemampuan literasi	52,8	Nilai			57,45	57,45		-	APBK	Disdikbud			68,09	68,09		-	APBK	Disdikbud
5	Kemampuan numerasi	41,44	Nilai			58,36	58,36		-	APBK	Disdikbud			68,77	68,77		-	APBK	Disdikbud

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Perbedaan skor literasi	3,26	Nilai			2,48	2,48		-	APBK	Disdikbud			2.61	2.61		-	APBK	Disdikbud
7	Perbedaan skor numerasi	0,69	Nilai			1,57	1,57		-	APBK	Disdikbud			1.93	1.93		-	APBK	Disdikbud
8	Indeks iklim keamanan	2.3	Nilai			0,85	0,85		-	APBK	Disdikbud			1.39	1.39		-	APBK	Disdikbud
9	Indeks iklim kebinekaan	0,11	%			0,68	0,68		-	APBK	Disdikbud			1.26	1.26		-	APBK	Disdikbud
10	Iklim Inklusivitas	55,38	%			56,53	56,53		-	APBK	Disdikbud			67.40	67.40		-	APBK	Disdikbud
11	Kecukupan formasi guru ASN	40,91	%			100	100		-	APBK	Disdikbud			100.00	100.00		-	APBK	Disdikbud
12	Indeks distribusi guru	0,91	%			0,91	0,91		-	APBK	Disdikbud			0.93	0.93		-	APBK	Disdikbud
13	Proporsi PTK bersertifikat	46,26	%			94,5	94,5		-	APBN	Disdikbud			95.88	95.88		-	APBN	Disdikbud
14	Proporsi PTK penggerak	0	%			0.82%	0.82%		-	APBN/A PBK	Disdikbud			12.51	12.51		-	APBN/APBK	Disdikbud
15	Pengalaman pelatihan guru	5,9	%			59,4	59,4		-	APBN/A PBK/OTSUS	Disdikbud			64.55	64.55		-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud
	SMP	2.894	Orang	2.952	2.952			Rp 4.376.520.120	-	APBK	Disdikbud	3.011	3.011			Rp 4.814.172.152	-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar	97.5	%			107,44	107,44	0	-	APBK	Disdikbud			105.58	105.58	0	-	APBK	Disdikbud
2	Angka partisipasi sekolah	99,12	%			98,92	98,92	4,376,490,120	-	APBK	Disdikbud			99.19	99.19	4,307,787,500	-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni	66.8	%			75,92	75,92		-	APBK	Disdikbud			81.94	81.94	0	-	APBK	Disdikbud
4	Kemampuan literasi	57,65	Nilai			69,55	69,55	0	-	APBK	Disdikbud			77.16	77.16	0	-	APBK	Disdikbud
5	Kemampuan numerasi	53,75	Nilai			55,79	55,79	0	-	APBK	Disdikbud			66.84	66.84	0	-	APBK	Disdikbud
6	Perbedaan skor literasi	2,41	Nilai			6,83	6,83	0	-	APBK	Disdikbud			5.87	5.87	0	-	APBK	Disdikbud
7	Perbedaan skor numerasi	0,49	Nilai			3,54	3,54	0	-	APBK	Disdikbud			3.41	3.41	0	-	APBK	Disdikbud
8	Indeks iklim keamanan	68,69	Nilai			69,1	69,1	10,000	-	APBK	Disdikbud			52.58	52.58	844,000	-	APBK	Disdikbud
9	Indeks iklim kebinekaan	60,15	%			67,25	67,25	10,000	-	APBK	Disdikbud			51.19	51.19	844,000	-	APBK	Disdikbud
10	Iklim Inklusivitas	51,76	%			55,46	55,46	10,000	-	APBK	Disdikbud			66.60	66.60	844,000	-	APBK	Disdikbud
11	Kecukupan formasi guru ASN	83,33	%			93	93	0	-	APBK	Disdikbud			94.75	94.75	0	-	APBK	Disdikbud
12	Indeks distribusi guru	1,07	%			0,43	0,43	0	-	APBK	Disdikbud			0.57	0.57	0	-	APBK	Disdikbud
13	Proporsi PTK bersertifikat	50,22	%			98,85	98,85	0	-	APBN	Disdikbud			99.14	99.14	0	-	APBN	Disdikbud

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14	Proporsi PTK penggerak	0	%			2.98%	2.98%	0	-	APBN/APBK	Disdikbud			12.52	12.52	0	-	APBN/APBK	Disdikbud
15	Pengalaman pelatihan guru	3,76	%			61,8	61,8	0	-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud			66.35	66.35	0	-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud
3)	Pendidikan Kesetaraan	395	Orang	403	403				-	APBK	Disdikbud	411	411				-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar		%						-										
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.		%			17,42	17,42		-	APBK	Disdikbud			21.82	21.82		-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni																		
4	Kemampuan literasi																		
5	Kemampuan numerasi																		
6	Perbedaan skor literasi																		
7	Perbedaan skor numerasi																		
8	Indeks iklim keamanan																		
9	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas																		
10	Kecukupan formasi guru ASN																		
11	Indeks distribusi guru																		
12	Proporsi PTK bersertifikat																		
13	Proporsi PTK penggerak																		
14	Pengalaman Pelatihan Guru																		

Lanjutan Tabel 3.8

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Kabupaten/Kota																								
1)	Pendidikan Anak Usia Dini	1.952	1.952			Rp 1.608.538.286	-	APBK	Disdikbud	1.963	1.963			Rp1.769.671.326	-	APBK	Disdikbud	2.160	2.160			Rp 1.946.638.459	-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi sekolah			82.56	82.56		-	APBK	Disdikbud			86.92	86.92		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
2	Pertumbuhan Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi B			89.77	89.77		-	APBK	Disdikbud			92.33	92.33		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
3	Pertumbuhan pendidik PAUD di S1/DIV			95.76	95.76		-	APBK	Disdikbud			96.82	96.82		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
4	Rasio pengawas sekolah untuk PAUD			2.26	2.26		-	APBK	Disdikbud			2.94	2.94		-	APBK	Disdikbud			5	5		-	APBK	Disdikbud
5	Kecukupan formasi guru ASN						-								-								-		
6	Indeks distribusi guru			0.69	0.69		-	APBK	Disdikbud			0.77	0.77		-	APBK	Disdikbud			1	1		-	APBK	Disdikbud
7	Proporsi PTK bersertifikat			40.20	40.20		-	APBN	Disdikbud			45.15	45.15		-	APBN	Disdikbud			60	60		-	APBN	Disdikbud
8	Proporsi PTK penggerak			8.75	8.75		-	APBN/APBK	Disdikbud			11.57	11.57		-	APBN/APBK	Disdikbud			20	20		-	APBN/APBK	Disdikbud
9	Pengalaman pelatihan guru			0	0		-								-								-		
2)	Pendidikan Dasar																								
	SD	5.102	5.102			Rp 7.472.027.874		APBK	Disdikbud	7.036	7.036			Rp 8.219.230.661	-	APBK	Disdikbud	7.739	7.739			Rp 9.041.153.728	-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar			95.84	95.84		-	APBK	Disdikbud			96.88	96.88		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
2	Angka partisipasi sekolah			99.94	99.94		-	APBK	Disdikbud			99.96	99.96		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni			90.09	90.09		-	APBK	Disdikbud			92.57	92.57		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
4	Kemampuan literasi			76.07	76.07		-	APBK	Disdikbud			82.05	82.05		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
5	Kemampuan numerasi			76.58	76.58		-	APBK	Disdikbud			82.43	82.43		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
6	Perbedaan skor literasi			2.71	2.71		-	APBK	Disdikbud			2.78	2.78		-	APBK	Disdikbud			3	3		-	APBK	Disdikbud
7	Perbedaan skor numerasi			2.20	2.20		-	APBK	Disdikbud			2.40	2.40		-	APBK	Disdikbud			3	3		-	APBK	Disdikbud
8	Indeks iklim keamanan			1.79	1.79		-	APBK	Disdikbud			2.09	2.09		-	APBK	Disdikbud			3	3		-	APBK	Disdikbud
9	Indeks iklim kebinekaan			1.70	1.70		-	APBK	Disdikbud			2.02	2.02		-	APBK	Disdikbud			3	3		-	APBK	Disdikbud
10	Iklim Inklusivitas			75.55	75.55		-	APBK	Disdikbud			81.66	81.66		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
11	Kecukupan formasi guru ASN			100.00	100.00		-	APBK	Disdikbud			100.00	100.00		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
12	Indeks distribusi guru			0.95	0.95		-	APBK	Disdikbud			0.96	0.96		-	APBK	Disdikbud			1	1		-	APBK	Disdikbud
13	Proporsi PTK bersertifikat			96.91	96.91		-	APBN	Disdikbud			97.68	97.68		-	APBN	Disdikbud			100	100		-	APBN	Disdikbud
14	Proporsi PTK penggerak			21.88	21.88		-	APBN/APBK	Disdikbud			28.91	28.91		-	APBN/APBK	Disdikbud			50	50		-	APBN/APBK	Disdikbud
15	Pengalaman pelatihan guru			68.41	68.41		-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud			71.31	71.31		-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud			80	80		-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud
	SMP	3.071	3.071			Rp. 5.295.589.345	-	APBK	Disdikbud	3133	3133			Rp. 5.825.148.280		APBK	Disdikbud	3.195	3.195			Rp. 6.407.663.108	-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar			104.19	104.19		-	APBK	Disdikbud			103.14	103.14		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
2	Angka partisipasi sekolah			99.39	99.39		-	APBK	Disdikbud			99.54	99.54		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
3	Angka partisipasi murni			86.46	86.46		-	APBK	Disdikbud			89.84	89.84		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
4	Kemampuan literasi			82.87	82.87		-	APBK	Disdikbud			87.15	87.15		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
5	Kemampuan numerasi			75.13	75.13		-	APBK	Disdikbud			81.35	81.35		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
6	Perbedaan skor literasi			5.15	5.15		-	APBK	Disdikbud			4.62	4.62		-	APBK	Disdikbud			3	3		-	APBK	Disdikbud
7	Perbedaan skor numerasi			3.30	3.30		-	APBK	Disdikbud			3.23	3.23		-	APBK	Disdikbud			3	3		-	APBK	Disdikbud
8	Indeks iklim keamanan			40.18	40.18		-	APBK	Disdikbud			30.89	30.89		-	APBK	Disdikbud			3	3		-	APBK	Disdikbud
9	Indeks iklim kebinekaan			39.14	39.14		-	APBK	Disdikbud			30.11	30.11		-	APBK	Disdikbud			3	3		-	APBK	Disdikbud
10	Iklim Inklusivitas			74.95	74.95		-	APBK	Disdikbud			81.21	81.21		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud
11	Kecukupan formasi guru ASN			96.06	96.06		-	APBK	Disdikbud			97.05	97.05		-	APBK	Disdikbud			100	100		-	APBK	Disdikbud

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisia si	Sumber Pendana an	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisia si	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisia si	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksana
		Peneri ma Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Penerim a Layana n Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran				Peneri ma Layan an Dasar	Realis asi	Mutu Layan an	Realis asi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
12	Indeks distribusi guru			0.68	0.68		-	APBK	Disdikbud			0.76	0.76		-	APBK	Disdikbud			1	1		-	APBK	Disdikbud
13	Proporsi PTK bersertifikat			99.35	99.35		-	APBN	Disdikbud			99.51	99.51		-	APBN	Disdikbud			100	100		-	APBN	Disdikbud
14	Proporsi PTK penggerak			21.89	21.89		-	APBN/APBK	Disdikbud			28.92	28.92		-	APBN/APBK	Disdikbud			50	50		-	APBN/APBK	Disdikbud
15	Pengalaman pelatihan guru			69.76	69.76		-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud			72.32	72.32		-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud			80	80		-	APBN/APBK/OTSUS	Disdikbud
3)	Pendidikan Kesetaraan	419	419			Rp 732.715.500	-	APBK	Disdikbud	428	428			Rp 805.987.050	-	APBK	Disdikbud	436	436			Rp 886.585.756	-	APBK	Disdikbud
1	Angka partisipasi kasar														-								-		
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan <i>Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.</i>			25.11	25.11		-	APBK	Disdikbud			27.58	27.58		-	APBK	Disdikbud			35	35		-	APBK	Disdikbud
6	Angka partisipasi murni						-								-								-		
7	Kemampuan literasi						-								-								-		
8	Kemampuan numerasi						-								-								-		
9	Perbedaan skor literasi						-								-								-		
10	Perbedaan skor numerasi						-								-								-		
11	Indeks iklim keamanan						-								-								-		
12	Indeks iklim kebinekaan dan inklusivitas						-								-								-		
13	Kecukupan formasi guru ASN						-								-								-		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
14	Indeks distribusi guru						-								-								-		
15	Proporsi PTK bersertifikat						-								-								-		
16	Proporsi PTK penggerak						-								-								-		
17	Pengalaman pelatihan guru						-								-								-		

3.2.2 Renaksi Penerapan SPM Urusan Kesehatan Kota Sabang 2023-2027

Tabel 3.9
RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN KESEHATAN KOTA SABANG 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Kabupaten/Kota																		
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	700	Orang	807	807			227,050,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	804	804			249.755.000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	519	ampul			101	101		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			101	101		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2	Tablet Tambah Darah	600	tablet			72630	72630		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			72360	72360		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	700	Paket			807	807		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			804	804		-	APBK/D AK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Pemeriksaan Glukoprotein Urin	700	Paket			122	122		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			121	121		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	700	Paket			807	807		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			804	804		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	700	Buku			807	807		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			804	804		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
7	Kunjungan K4	621	Orang			3228	3228		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3216	3216		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
8	Dokter/dokter spesialis kebidanan	2	Orang			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
9	Bidan	49	Orang			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
10	Perawat	0	Orang			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	618	Orang	771	771			1,540,810,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	768	768			1.649.891.000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Formulir Partograf	618	Formulir			771	771		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			768	768		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2	Kartu ibu (rekam medis)	618	Paket			771	771		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			768	768		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	618	Buku			771	771		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			768	768		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2	Orang			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Bidan	49	Orang			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6	Perawat	0	Orang			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	615	Orang	727	727			5,000,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	725	725			5,500,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Vaksin Hepatitis BO	615	Vaksin			727	727		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			725	725		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2	Vitamin K1 Injeksi	615	Ampul			727	727		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			725	725		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik	615	Orang			727	727		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			725	725		-	APBK/D AK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Formulir Bayi Baru Lahir	615	Formulir			727	727		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			725	725		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	615	Orang			2181	2181		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			2175	2175		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	615	Buku			727	727		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			725	725		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
7	Dokter/dokter spesialis Anak	2	Orang			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
8	Bidan	49	Orang			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
9	Perawat	0	Orang			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			7	7		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	1571	Orang	3547	3547			12,700,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	3528	3528			13.970.000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	1571	Dokumen			3547	3547		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3528	3528		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	1571	Formulir			3547	3547		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3528	3528		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	1571	Buku			3547	3547		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3528	3528		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
4	Vitamin A Biru	327	Kapsul			727	727		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			724	724		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Vitamin A Merah	3058	Kapsul			2820	2820		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			2804	2804		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	112	Vaksin			110	110		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			110	110		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	177	Vaksin			175	175		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			175	175		-	APBK/D AK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	HBo	500	Vaksin			3547	3547		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3528	3528		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
	BCG	292	Vaksin			1183	1183		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			1177	1177		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
	Polio	216	Orang			444	444		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			442	442		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
	IPV	143	Vaksin			444	444		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			442	442		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
	DPT-HB-Hib	214	Vaksin			444	444		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			442	442		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
	Campak - Rubella	239	Vaksin			444	444		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			442	442		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)		Unit			3547	3547		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3528	3528		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
9	Peralatan Anafilaktik		Paket			15	15		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			15	15		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
10	Bidan	49	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
11	Dokter	16	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
12	Perawat	7	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
13	Ahli Gizi	11	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
14	Guru PAUD		Orang			20	20		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			20	20		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
15	Kader Kesehatan	180	Orang			18	18		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			18	18		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	6317	Orang	3370	3370			282,950,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	3348	3348			311.245.000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Buku Raport Sehatanku	0	Buku			3370	3370		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3348	3348		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2	Buku Pemantauan Kesehatan	0	Buku			1404	1404		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			1398	1398		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	1684	Dokumen			4774	4774		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			4746	4746		-	APBK/D AK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	3370	Dokumen			3370	3370		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3348	3348		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	3370	Formulir			1404	1404		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			1398	1398		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6	Dokter/Dokter gigi	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
7	Bidan	0	Orang			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
8	Perawat	12	Orang			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
9	Ahli Gizi	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
11	Guru	48	Orang			40	40		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			40	40		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
12	Kader Kesehatan	5	Orang			18	18		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			18	18		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	2371	Orang	6940	6940			97,500,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	7000	7000			107.000.000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	0	Pedoman			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	0	Unit			22684	22684		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			22829	22829		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	0	Dokumen			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
4	Dokter	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Bidan	0	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6	Perawat	6	Orang			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
7	Ahli Gizi	0	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	0	Orang			18	18		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			18	18		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	700	Orang	3446	3446			153,500,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	3582	2382			306,000,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	2484	Paket			3446	3446		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3582	3582		-	APBK/D AK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	0	Paket			3446	3446		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3582	3582		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Buku Kesehatan Lansia	54	Buku			3446	3446		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			3582	3582		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
4	Dokter	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Bidan	0	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6	Perawat	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
7	Ahli Gizi	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih	12	Orang			18	18		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			18	18		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	4456	Orang	3678	3678			4,999,880	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	3670	3670			5,200,000	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	12	Pedoman			16	16		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			16	16		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2	Tensimeter	0	Unit			30	30		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			30	30		-	APBK/D AK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	6	Dokumen			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
4	Dokter	6	Orang			10	10		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			10	10		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Bidan	0	Orang			10	10		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			10	10		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6	Perawat	6	Orang			10	10		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			10	10		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2743	Orang	26130	26130			39,777,860	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	26411	26411			43.755.646	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Glukometer	0	Unit			40	40		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			40	40		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2	Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	8793	Unit			26130	26130		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			26411	26411		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	0	Pedoman			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
4	Dokter	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Bidan	0	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
6	Perawat	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
7	Ahli Gizi	0	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat	0	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	161	Orang	6	6			55,399,690	-	APBK/D AK	Dinkes& KB	6	6			60.939.659	-	APBK/D AK	Dinkes& KB
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	6	Buku			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
2	Kit berisi 2 alat fiksasi	6	Paket			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	6	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	4	Orang			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	28	Orang	128	128			74,049,690		APBK/D AK	Dinkes& KB	??	??			81.454.659		APBK/DAK	Dinkes& KB
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	0	Media			12	12		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
2	Reagen Zn TB	20	Paket			128	128		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			0	0		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
3	Masker jenis rumah tangga dan masker N95	20	Paket			128	128		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			0	0		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	400	Paket			128	128		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			0	0		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
5	Catridge tes cepat molekuler	100	Paket			128	128		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			0	0		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	7	Dokumen			128	128		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			0	0		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur	7	Dokumen			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	1	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
9	Perawat	7	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
10	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	7	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
11	Penata Rontgen	1	Orang			2	2		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			2	2		-	APBK/DAK	Dinkes& KB
12	Tenaga kesehatan masyarakat	7	Orang			6	6		-	APBK/D AK	Dinkes& KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes& KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
13	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai	0	Orang			18	18		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			18	18		-	APBK/DAK	Dinkes&KB
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	494	Orang	884	884			12,099,843	-	APBK/DAK	Dinkes&KB	881	881		13.309.827	-	APBK/DAK	Dinkes&KB	
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	0	Media			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes&KB
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama	633	Paket			884	884		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			881	881		-	APBK/DAK	Dinkes&KB
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	0	Paket			884	884		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			881	881		-	APBK/DAK	Dinkes&KB
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	0	Paket			884	884		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			881	881		-	APBK/DAK	Dinkes&KB
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	7	Orang			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Perawat	7	Orang			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB
7	Bidan	7	Orang			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	7	Orang			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB
9	Tenaga kesehatan masyarakat	7	Orang			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	0	Orang			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes&KB

Lanjutan Tabel 3.9

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
	Kabupaten /Kota																								
1)	Pelayanan kesehatan ibu hamil	802	802			274.730.500	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	800	800			302.203.550	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	798	798			332.423.905	-	APBK/DAK	Dinkes &KB
1	Vaksin Tetanus Difetri (Td)			101	101		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			100	100		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			100	100		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
2	Tablet Tambah Darah			72180	72180		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			72000	72000		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			71820	71820		-	APBK/DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaks ana	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaks ana	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaks ana
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotei n Urin			802	802		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			800	800		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			798	798		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
4	Pemeriksaan Glukoprotei n Urin			121	121		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			120	120		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			120	120		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
5	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu			802	802		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			800	800		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			798	798		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			802	802		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			800	800		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			798	798		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
7	Kunjungan K4			3208	3208		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			3200	3200		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			3192	3192		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
8	Dokter/dokter spesialis kebidanan			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
9	Bidan			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
10	Perawat			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
2)	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	765	765			1.864 .380. 100	-	APBK/ DAK	Dinkes &KB	762	762			2.050 .818. 110	-	APBK/ DAK	Dinkes &KB	759	759			2.255 .899. 921	-		
1	Formulir Partograf			765	765		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			762	762		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			759	759		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksa na
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	Kartu ibu (rekam medis)			765	765		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			762	762		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			759	759		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			765	765		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			762	762		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			759	759		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
4	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
5	Bidan			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
6	Perawat			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
3)	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	724	724			6.050.000	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	723	723			6.655.000	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	722	722			7.320.500	-	APBK/DAK	Dinkes &KB
1	Vaksin Hepatitis BO			724	724		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			723	723		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			722	722		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
2	Vitamin K1 Injeksi			724	724		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			723	723		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			722	722		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
3	Salep/Tetes Mata Antibiotik			724	724		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			723	723		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			722	722		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
4	Formulir Bayi Baru Lahir			724	724		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			723	723		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			722	722		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
5	Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)			2172	2172		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			2169	2169		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			2166	2166		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)			724	724		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			723	723		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			722	722		-	APBK/DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
7	Dokter/dokter spesialis Anak			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
8	Bidan			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
9	Perawat			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
4)	Pelayanan Kesehatan Balita	3513	3513			15.367.000	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	3498	3498			16.903.700	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	3483	3483			18.594.070	-	APBK/DAK	Dinkes &KB
1	Kuisiner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku			3513	3513		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3498	3498		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3483	3483		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)			3513	3513		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3498	3498		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3483	3483		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
3	Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)			3513	3513		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3498	3498		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3483	3483		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
4	Vitamin A Biru			721	721		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			719	719		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			717	717		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
5	Vitamin A Merah			2792	2792		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			2779	2779		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			2766	2766		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
6	Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB - Hib, Campak, Rubella			110	110		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			110	110		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			110	110		-	APBK/DAK	Dinkes &KB

N O	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instan si Pelaks ana	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instan si Pelaks ana
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
7	Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB - Hib, Campak, Rubella			175	175		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			175	175		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			175	175		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
	HBo			3513	3513		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			3498	3498		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			3483	3483		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
	BCG			1172	1172		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			1166	1166		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			1161	1161		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
	Polio			440	440		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			438	438		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			436	436		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
	IPV			440	440		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			438	438		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			436	436		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
	DPT-HB-Hib			440	440		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			438	438		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			436	436		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
	Campak - Rubella			440	440		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			438	438		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			436	436		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
8	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)			3513	3513		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			3498	3498		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			3483	3483		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
9	Peralatan Anafilaktik			15	15		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			15	15		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			15	15		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
10	Bidan			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
11	Dokter			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
12	Perawat			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
13	Ahli Gizi			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
14	Guru PAUD			20	20		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			20	20		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			20	20		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
15	Kader Kesehatan			18	18		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			18	18		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			18	18		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksa na
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
5)	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	3320	3320			342.369.500	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	3300	3300			367.606.450	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	3280	3280			414.267.095	-	APBK	Dinkes &KB
1	Buku Raport Kesehatanku			3320	3320		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3300	3300		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3280	3280		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
2	Buku Pemantauan Kesehatan			1390	1390		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			1380	1380		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			1380	1380		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
3	Kuesioner Skrining Kesehatan			4710	4710		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			4680	4680		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			4660	4660		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah			3320	3320		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3300	3300		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3280	3280		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah			1390	1390		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			1380	1380		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			1380	1380		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
6	Dokter/Dokter gigi			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
7	Bidan			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
8	Perawat			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
9	Ahli Gizi			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
10	Tenaga Kesehatan Masyarakat			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
11	Guru			40	40		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			40	40		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			40	40		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
12	Kader Kesehatan			18	18		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			8	8		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			8	8		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
6)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	7010	7010			117.972.000	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	7020	7020			129.772.500	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	7230	7230			142.749.750	-	APBK	Dinkes &KB
1	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
2	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes			22961	22961		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			23121	23121		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			23283	23283		-	APBK/DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksa na
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
4	Dokter			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
5	Bidan			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
6	Perawat			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
7	Ahli Gizi			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih			18	18		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			18	18		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			18	18		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
7)	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	3724	3724			336.600.000	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	3873	3873			370.260.000	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	4027	4027			407.286.000	-	APBK	Dinkes &KB
1	Strip uji pemeriksaa n gula darah, kolesterol			3724	3724		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3873	3873		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			4027	4027		-	APBK/DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)			3724	3724		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3873	3873		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			4207	4207		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
3	Buku Kesehatan Lansia			3724	3724		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			3873	3873		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			4207	4207		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
4	Dokter			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
5	Bidan			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
6	Perawat			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
7	Ahli Gizi			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
9	Tenaga Non Kesehatan Terlatih			18	18		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			18	18		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			18	18		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
8)	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	3665	3665			5.720.000	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	3660	3660			6.292.000	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	3655	3655			6.921.200		APBK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksa na
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Pedoman pengendalia n Hipertensi dan media Komunikasi , Informasi, Edukasi (KIE)			16	16		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			16	16		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			16	16		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
2	Tensimeter			30	30		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			30	30		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			30	30		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
3	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
4	Dokter			10	10		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			10	10		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			10	10		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
5	Bidan			10	10		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			10	10		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			10	10		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
6	Perawat			10	10		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			10	10		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			10	10		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
7	Tenaga Kesehatan Masyarakat			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
9)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	2668 5	2668 5			48.13 1.211	-	APBK/ DAK	Dinkes &KB	2697 8	2697 8			52.94 4.332	-	APBK/ DAK	Dinkes &KB	2727 5	2727 5			58.23 8.765		APBK	Dinkes &KB
1	Glukometer			40	40		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			40	40		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			40	40		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
2	Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet			26685	26685		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			26978	26978		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			27275	27275		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
3	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
4	Dokter			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
5	Bidan			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
6	Perawat			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
7	Ahli Gizi			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
8	Tenaga Kesehatan Masyarakat			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
10)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	6	6			67.033.625	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	6	6			73.736.987		APBK	Dinkes &KB	6	6			81.110.686		APBK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
2	Kit berisi 2 alat fiksasi			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
3	Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
4	Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
5	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
11)	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	130	130			81.45 4.659		APBK/ DAK	Dinkes &KB	132	132			89.60 0.125		APBK/ DAK	Dinkes &KB	135	135			98.56 0.000		APBK/ DAK	Dinkes &KB
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)			12	12		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			12	12		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
2	Reagen Zn TB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
3	Masker jenis rumah tangga dan masker N95			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bu nsen, Ose/Lidi), Rak pengering			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
5	Catridge tes cepat molekuler			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
6	Formulir pencatatan dan pelaporan			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			0	0		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
7	Pedoman/S tandar Operasional Prosedur			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
8	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
9	Perawat			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
10	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
11	Penata Rontgen			2	2		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			2	2		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			2	2		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
12	Tenaga kesehatan masyarakat			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
13	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai			18	18		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			18	18		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			18	18		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
12)	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	879	879			14.640.810	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	877	877			16.104.891	-	APBK/DAK	Dinkes &KB	875	875			17.715.380	-	APBK/DAK	Dinkes &KB
1	Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			6	6		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
2	Tes cepat HIV (RDT) pertama			879	879		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			877	877		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			875	875		-	APBK/DAK	Dinkes &KB
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai			879	879		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			877	877		-	APBK/DAK	Dinkes &KB			875	875		-	APBK/DAK	Dinkes &KB

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisi asi	Sumber Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2026					Inisi asi	Sumb er Penda naan	Instansi Pelaksa na	Pencapaian SPM 2027					Inisi asi	Sumbe r Penda naan	Instansi Pelaksa na
		Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran				Pener ima Layan an Dasar	Reali sasi	Mutu Layan an	Reali sasi	Angg aran			
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
4	Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK			879	879		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			877	877		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			875	875		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
5	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
6	Perawat			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
7	Bidan			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
8	Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
9	Tenaga kesehatan masyarakat			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB
10	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB			7	7		-	APBK/ DAK	Dinkes &KB

3.2.3 Renaksi Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kota Sabang 2023-2027

Tabel 3.10

RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN PEKERJAAN UMUM KOTA SABANG 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
				5	6	7	8	9				13	14	15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	Kabupaten/Kota Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			26000	26000			10,489,266,362	-	DAK	PUPR	3400	3400			12.338.192.998	-	DAK	PUPR
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	7581	Sambungan Rumah (SR)			320	320	5,244,633,181	-	DAK	PUPR			300	300	5,769,096,499	-	DAK	PUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	7581	Sambungan Rumah (SR)			200	200	5,244,633,181	-	DAK	PUPR			300	300	5,769,096,499	-	DAK	PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	271	Rumah Tangga			100	100	-	-	-				20	20	400,000,000	-	APBK	PUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau)	271	Rumah Tangga			100	100	-	-	-				20	20	400,000,000	-	APBK	PUPR
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestic			1500	1500			3.882.000.000	-	APBK, DAK, OTSUS	PUPR	4750	4750			3.670,000,000	-	APBK,DAK,OTSUS	PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	33	Sambungan Rumah (SR)			100	100	1,190,000,000	-	DAK/OTSUS	PUPR			300	300	3,000,000,000	-	DAK/OTSUS	PUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)	0	Sambungan Rumah (SR)			0	0	-	-	-				0	0		-		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	0	Sambungan Rumah (SR)			0	0	1.542.000,00 0	-	APBK	PUPR			0	0	40,000,000	-	APBK	PUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)	172	Sambungan Rumah (SR)			100	100	1,150,000,00 0	-	DAK	PUPR			50	50	630,000,000	-	DAK	PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)	0	Sambungan Rumah (SR)			0	0	-	-	APBK	PUPR			0	0	-	-	-	PUPR

Lanjutan Tabel 3.10

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1)	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2400	2400			12.3338.192.998	-	APBK/DAK	PUPR	2400	2400			14.761.213.530	-	APBK/DAK	PUPR	2400	2400			15.810.140.166	-	APBK/DAK	PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)			300	300	6.346.006.149	-	APBK/DAK	PUPR			300	300	6.980.606,765	-	APBK/DAK	PUPR			300	300	7.505.070,083	-	APBK/DAK	PUPR
2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau)			180	180	6.346.006.149	-	APBK/DAK	PUPR			180	180	6.980.606,765	-	APBK/DAK	PUPR			180	180	7.505.070,083	-	APBK/DAK	PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)			20	20	400.000.000	-	APBK	PUPR			18	18	400.000.000	-	APBK/DAK	PUPR			18	18	400.000.000	-	APBK/DAK	PUPR
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terhadap Kualitas air (tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa, tidak berbau)			20	20	400,000,000	-	APBK	PUPR			40	40	400.000.000	-	APBK/DAK	PUPR			18	18	400.000.000	-	APBK/DAK	PUPR
2)	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	4750	4750			3.670.000.000	-	APBK,DAK,OTSUS	PUPR	1000	1000				-	APBK,DAK,OTSUS	PUPR	1500	1500				-	APBK,DAK,OTSUS	PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)			300	300	3,000,000,000	-	DAK	PUPR			200	200	2,000,000,000	-	DAK	PUPR			100	100	1,220,000,000	-	DAK/OTSUS	PUPR
2	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses dasar bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk <25 jiwa/hektar)			0	0		-					0	0		-					0	0		-		

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah perdesaan yang memiliki kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			300	300	3.000.000,000	-	APBK	PUPR			300	300	45.000.000	-	APBK	PUPR			300	300	50.000.000	-	APBK	PUPR
4	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik (minimal 1 akses pengolahan air limbah domestik)			50	50	630.000.000	-	DAK	PUPR			50	50	630.000.000	-	DAK	PUPR			50	50	630.000.000	-	DAK	PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
5	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terhadap Kualitas pelayanan air limbah domestik (akses aman bagi masyarakat wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk >25 jiwa/hektar dan seluruh wilayah perkotaan)			-	-	-	-	-	-						-	-	-								

3.2.4 Renaksi Penerapan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Sabang 2023-2027

Tabel 3.11

RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN PERUMAHAN RAKYAT KOTA SABANG 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	Kabupaten/Kota Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Orang	140	140			2,759,998,086	-	APBK	PUPR	225	225			4,409,998,086	-	APBK	PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	Satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	0	Unit			5	5	100,000,000	-	APBK	PUPR			5	5	100,000,000	-	APBK	PUPR
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	0	Unit			10	10	600,000,000	-	APBK	PUPR			20	20	1,200,000,000	-	APBK	PUPR
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	0	Unit			10	10	1,609,998,086	-	APBK	PUPR			10	10	1,609,998,086	-	APBK	PUPR
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.	0	Unit			3	3	450,000,000	-	APBK	PUPR			10	10	1,500,000,000	-	APBK	PUPR
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																		
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat		Orang	55	55			1,600,000,000	-	APBK	PUPR	55	55			1,600,000,000	-	APBK	PUPR
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	0	Unit			3	3	1,000,000,000	-	APBK	PUPR			3	3	1,000,000,000	-	APBK	PUPR
2	Subsidi uang sewa	0	Unit			5	5	100,000,000	-	APBK	PUPR			5	5	100,000,000	-	APBK	PUPR
3	Penyediaan rumah layak huni	0	Unit			3	3	500,000,000	-	APBK	PUPR			3	3	500,000,000	-	APBK	PUPR

Lanjutan Tabel 3.11

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			

		Dasar								Dasar							Dasar		n						
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Kabupaten/Kota																								
1)	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	275	275			5,802,097,684	-	APBK	PUPR	375	375			6,774,307,452	-	APBK	PUPR	225	225			5,954,307,452	-	APBK	PUPR
1	Bantuan akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana			15	15	250,000,000	-	APBK	PUPR			25	25	350,000,000	-	APBK	PUPR			5	5	100,000,000	-	APBK	PUPR
2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana			10	10	600,000,000	-	APBK	PUPR			20	20	1,200,000,000	-	APBK	PUPR			10	10	600,000,000	-	APBK	PUPR
3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana			20	20	3,452,097,684	-	APBK	PUPR			20	20	3,654,307,452	-	APBK	PUPR			20	20	3,654,307,452	-	APBK	PUPR
4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi bagi korban bencana.			10	10	1,500,000,000	-	APBK	PUPR			10	10	1,570,000,000	-	APBK	PUPR			10	10	1,600,000,000	-	APBK	PUPR
2)	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
	Bila tidak ada target relokasi, maka diisi dengan dokumen 3 tahapan disertai dengan biaya rapat	55	55			1,600,000,000	-	APBK	PUPR	55	55			1,600,000,000	-	APBK	PUPR	55	55			1,600,000,000	-	APBK	PUPR

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana					
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran								
																										Penerimaan Layanan	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44					
1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan			3	3	1,000,000,000	-	APBK	PUPR			3	3	1,000,000,000	-	APBK	PUPR			3	3	1,000,000,000	-	APBK	PUPR					
2	Subsidi uang sewa			5	5	100,000,000	-	APBK	PUPR			5	5	100,000,000	-	APBK	PUPR			5	5	100,000,000	-	APBK	PUPR					
3	Penyediaan rumah layak huni			3	3	500,000,000	-	APBK	PUPR			3	3	500,000,000	-	APBK	PUPR			3	3	500,000,000	-	APBK	PUPR					

3.2.5 Renaksi Penerapan SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Sabang 2023-2027

Tabel 3.12

RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KOTA SABANG 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1)	Kabupaten/Kota Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	3738	Orang	3738	3738			1,072,930,800		APBK	Satpol PP dan WH	3800	3800			1,620,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)	12	Unit			30	30	272,930,800	-	APBK	Satpol PP dan WH			15	15	350,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)	30	Dokumen			11	11	800,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			30	30	800,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)	0	Orang			28	28	0	-	-	Satpol PP dan WH			15	15	150,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)	0	Dokumen			15	15	0	-	-	Satpol PP dan WH			5	5	100,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)	0	orang			279	279	0	-	-	Satpol PP dan WH			3	3	200,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)	0	orang			30	30	0	-	-	Satpol PP dan WH			4	4	20,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH
2)	Kebencanaan																		
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	2231	Orang	2931	2931			80,000,000	-	APBK/DAK	BPBD	3000	3000			145,000,000	-	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)	1	Dokumen			1	1	80,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			1	1	80,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2231	Orang			2931	2931	-	-	-	BPBD			3000	3000	20,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)	2231	Orang			2931	2931	-	-	-	BPBD			3000	3000	30,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana	5	Unit			6	6	-	-	-	BPBD			6	6	15,000,000	-	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2231	Orang	2931	2931			1,022,698,252	-	APBK/DAK	BPBD	3000	3000			1,027,698,252	-	APBK/DAK	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)	10	Unit			10	10	1,002,698,252	-	APBK/DAK	BPBD			10	10	1,002,698,252	-	APBK/DAK	BPBD
2	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparaturnya yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)	9	Orang			9	9	20,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			9	9	25,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	40	Orang	12	12			497,000,000	-	APBK/DAK	BPBD	50	50			Rp520,000,000	-	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)	2	Posko			2	2	497,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	200,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/ menjadi korban bencana	12	Orang			12	12	-	-	-	-			50	50	50,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)	1	Dokumen			1	1	-	-	-	-			1	1	50,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)	1	layanan			1	1	-	-	-	-			1	1	120,000,000	-	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	1	layanan		1	1		-	-	-	-			1	1	100,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	3	Orang	10	10			690,000,000		APBK/DAK	BPBD	10	10			690,000,000		APBK/DAK	BPBD
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)	1	layanan		2	2		320,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	320,000,000	-	APBK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)	1	Dokumen			2	2	45,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	45,000,000	-	APBK	BPBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)	1	unit			2	2	100,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	100,000,000	-	APBK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar (2022)	satuan	Pencapaian SPM (2023)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2024)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)	7	orang			7	7	25,000,000	-	APBK	BPBD			7	7	25,000,000	-	APBK	BPBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)	4	layanan			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)	4	layanan			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD

Lanjutan Tabel 3.12

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	Kabupaten/Kota																								
1)	Pelayanan Ketertarikan dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)	3800	3800			1,620,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH	8100	8100			1,620,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH	8200	8200			1,620,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH
1	Standar sarana prasarana Satpol PP (jumlah dan kualitas barang dan jasa : a. gedung kantor, b. kendaraan operasional, c. perlengkapan operasional)			15	15	350,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			15	15	350,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			15	15	350,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH
2	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP (SOP penegakan Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa, pelaksanaan pengawasan pejabat/orang-orang penting, pelaksanaan tempat-tempat penting, pelaksanaan operasional patroli)			30	30	800,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			30	30	800,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			30	30	800,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH
3	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan masyarakat (jumlah dan kualitas personil/SDM)			15	15	150,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			15	15	150,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			15	15	150,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
4	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada (pelayanan kerugian material dan pelayanan pengobatan)			5	5	100,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			5	5	100,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			5	5	100,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH
5	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil (kerusakan akibat penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat)			3	3	200,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			3	3	200,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			3	3	200,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
6	Warga negara yang memperoleh pelayanan pengobatan (pertolongan pertama yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat)			4	4	20,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			4	4	20,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH			4	4	20,000,000	-	APBK	Satpol PP dan WH
2)	Kebencanaan																								
a	Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)	3000	3000			160,000,000	-	APBK/DAK	BPBD	3200	3200			170,000,000	-	APBK/DAK	BPBD	3300	3300			180,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana (tersedianya KRB dalam bentuk dokumen yang sah/legal)			1	1	90,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			1	1	90,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			1	1	90,000,000	-	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana			3000	3000	25,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			3200	3200	25,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			3300	3300	35,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana (tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, melalui media sosial dan wahana multimedia)			3000	3000	30,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			3200	3200	35,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			3300	3300	35,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
4	Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik KIE per jenis bencana			6	6	15,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			6	6	20,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			6	6	20,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
b	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	3000	3000			1,047,698,252	-	APBK/DAK	BPBD	3200	3200			1,052,698,252	-	APBK/DAK	BPBD	3300	3300			1,057,698,252	-	APBK/DAK	BPBD
1	Sarana prasarana penanggulangan bencana (seperti : tenda komando, mobil rescue, dapur umum, tenda posko kesehatan, air sanitasi, dll)			10	10	1,022,698,252	-	APBK/DAK	BPBD			10	10	1,022,698,252	-	APBK/DAK	BPBD			10	10	1,022,698,252	-	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM) (terlatihnya aparatur yang menangani sub-urusan bencana dan Warga Negara yang berada di kawasan rawan bencana)			10	10	25,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			10	10	30,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			11	11	35,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
c	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50	50			Rp540,000,000	-	APBK/DAK	BPBD	50	50			Rp550,000,000	-	APBK/DAK	BPBD	50	50			Rp570,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana (terlaksananya koordinasi sistem komando oleh pusdalops penanggulangan bencana dalam penyiapan petugas penanganan darurat bencana)			2	2	200,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			2	2	200,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			2	2	220,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana			50	50	50,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			50	50	50,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			50	50	50,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
3	Melakukan respon cepat darurat bencana (penyediaan dokumen kaji cepat dan penetapan status darurat bencana)			1	1	50,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			1	1	60,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			1	1	60,000,000	-	APBK/DAK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas (terrespon secara cepat setiap hasil penetapan status KLB kurang dari 24 jam)			1	1	120,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			1	1	120,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			1	1	120,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana			1	1	120,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			1	1	120,000,000	-	APBK/DAK	BPBD			1	1	120,000,000	-	APBK/DAK	BPBD
3)	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)	10	10			690,000,000		APBK/DAK	BPBD	10	10			690,000,000		APBK/DAK	BPBD	10	10			690,000,000		APBK/DAK	BPBD
1	Tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi (Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Damkar dan Penyelamatan, kelompok relawan pemadam kebakaran/redkar)			2	2	320,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	320,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	320,000,000	-	APBK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan dan evakuasi (seperti SOP MKKG, Pemadaman di Pemukiman, ... dst.)			2	2	45,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	45,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	45,000,000	-	APBK	BPBD
3	Sarana prasarana pemadam kebakaran (pos damkar & mobil damkar sebagai contoh : mobil damkar, kapal damkar, mobil Penyelamatan, mobil tangki air, mobil komando, ... dll.), penyelamatan dan evakuasi (helm petugas Penyelamatan, jaket, ... dll.)			2	2	100,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	100,000,000	-	APBK	BPBD			2	2	100,000,000	-	APBK	BPBD
4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/Sumber Daya Manusia (jumlah aparatur SDM damkar yang telah mengikuti pelatihan, minimal pemadam I)			7	7	25,000,000	-	APBK	BPBD			7	7	25,000,000	-	APBK	BPBD			7	7	25,000,000	-	APBK	BPBD
5	Pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran (korban jiwa langsung)			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM (2025)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2026)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM (2027)					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
6	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi bagi warga negara yang terdampak kebakaran (korban jiwa yang mengalami luka fisik, hilangnya nyawa, mengalami trauma, serta dampak sosial akibat kebakaran)			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD			4	4	100,000,000	-	APBK	BPBD

3.2.6 Renaksi Penerapan SPM Urusan Sosial Kota Sabang 2023-2027

Tabel 3.13
RENAKSI PENERAPAN SPM URUSAN SOSIAL KOTA SABANG 2023-2027

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Kabupaten/Kota																		
1)	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pant	38	Orang	52	52			15,700,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA	95	95			90,225,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA
1	Layanan data dan pengaduan	38	orang			28	28	2,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			28	28	2,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	Orang			6	6	-	-	-				6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
3	Penyediaan permakanan	0	Orang			0	0	-	-	-				5	5	525,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
4	Penyediaan sandang	0	Orang			6	6	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	500,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
5	Penyediaan alat bantu	28	Orang			0	0	-	-	-				10	10	40,000,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	Orang			0	0	-	-	-				5	5	300,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	28	Orang			4	4	1,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	28	Orang			1	1	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0	Orang			0	0	-	-	-	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0	Orang			1	1	-	-	-	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	Orang			3	3	6,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	Orang			3	3	6,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
13	Layanan rujukan	2	Orang			0	0	-	-	-				5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	16	orang	39	39			14,700,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA	77	77			40,025,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
1	Layanan data dan pengaduan	0	orang			15	15	1,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			20	20	1,500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	1	orang			6	6	-	-	-	-			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
3	Penyediaan permakanan	0	orang			0	0	-	-	-	-			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
4	Penyediaan sandang	0	orang			6	6	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	orang			0	0	-	-	-	-			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	orang			0	0	-	-	-	-			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	1	orang			4	4	1,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0	orang			1	1	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0	orang			0	0	-	-	-	-			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	orang			1	1	-	-	-	-			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	orang			3	3	6,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
12	Layanan rujukan	1	orang			3	3	6,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	10	Orang	28	28			15,700,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	28	28			90,225,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
1	Layanan data dan pengaduan	1	orang			28	28	2,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			28	28	2,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	1	orang			6	6	-	-	-	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
3	Penyediaan permakanan	0	Orang			0	0	-	-	-	-			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
4	Penyediaan sandang	0	Orang			6	6	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
5	Penyediaan alat bantu	10	Orang			0	0	-	-	-	-			10	10	40,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	Orang			0	0	-	-	-	-			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	Orang			4	4	1,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	0	Orang			1	1	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	0	Orang			0	0	-	-	-	-			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan	0	Orang			1	1	-	-	-	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	Orang			3	3	6,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	Orang			3	3	6,000,000	-	DAU	-			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
13	Layanan rujukan	0	Orang			0	0	-	-	-	-			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	2	Orang	28	28			15,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	28	28			40,525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
1	Layanan data dan pengaduan	2	orang			28	28	2,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			28	28	2,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	0	Orang			6	6	-	-	-	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
3	Penyediaan permakanan	0	Orang			0	0	-	-	-	-			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
4	Penyediaan sandang	0	Orang			6	6	-	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	0	Orang			0	0	-	-	-	-			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	0	Orang			0	0	-	-	-	-			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	0	Orang			4	4	1,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	0	Orang			1	1	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Tahun Dasar 2022	Satuan	Pencapaian SPM 2023					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2024					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	0	Orang			0	0	-	-	-	-			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	Orang			1	1	-	-	-	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	Orang			3	3	6,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
12	Layanan rujukan	0	Orang			3	3	6,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	948	Orang	2,680	2680			315,000,000	-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA	1650	1650			400,000,000	-	APBA / APBK	Dinsos,PMG, PPPA
1	Penyediaan permakanan	752	Orang			1,952	1,952	-	-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA			1000	1000		-	APBA / APBK	Dinsos,PMG, PPPA
2	Penyediaan sandang	556	Orang			488	488	-	-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA			400	400		-	APBA / APBK	Dinsos,PMG, PPPA
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	8	Unit			0	0	-	-	-	-			0	0		-	-	-
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	50	Orang			40	40	-	-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA			50	50		-	APBA / APBK	Dinsos,PMG, PPPA
5	Pelayanan dukungan Psikososial	200	Orang			200	200	315,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			200	200	400,000,000	-	DAU	Dinsos,PMG, PPPA

Lanjutan Tabel 3. 13

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	Kabupaten/ Kota																								
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	104	104			91,475,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	104	104			91,475,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	109	109			91,975,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
1	Layanan data dan pengaduan			35	35	3,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			35	35	3,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			40	45	3,500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
3	Penyediaan permakanan			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
4	Penyediaan sandang			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
5	Penyediaan alat bantu			10	10	40,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			10	10	40,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			10	10	40,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
10	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
13	Layanan rujukan			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
2)	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	79	79			40,275,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	79	79			40,275,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	79	79			40,275,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
1	Layanan data dan pengaduan			20	20	1,500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			20	20	1,500,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			20	20	1,500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
3	Penyediaan permakanan			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	525,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
4	Penyediaan sandang			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			8	8	750,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	200,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
12	Layanan rujukan			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
3)	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	35	35			91,475,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	35	35			91,475,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	45	45			91,975,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
1	Layanan data dan pengaduan			35	35	3,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			35	35	3,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			45	45	3,500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
3	Penyediaan permakanan			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
4	Penyediaan sandang			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
5	Penyediaan alat bantu			10	10	40,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			10	10	40,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			10	10	40,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
10	Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi layanan kesehatan			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
13	Layanan rujukan			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
4)	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	35	35			41,775,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	35	35			41,775,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	45	45			42,275,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
1	Layanan data dan pengaduan			35	35	3,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			35	35	3,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			45	45	3,500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerimaan Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
2	Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	14,400,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
3	Penyediaan permakanan			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	525,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
4	Penyediaan sandang			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			8	8	750,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
5	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	300,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			6	6	1,200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	600,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	200,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			4	4	500,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
12	Layanan rujukan			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			5	5	10,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
5)	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1400	1400			400,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	1130	1130			350,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA	520	520			350,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA
1	Penyediaan permakanan			800	800		-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA			600	600		-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA			300	300			APBA	Dinsos, PMG, PPPA
2	Penyediaan sandang			350	350		-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA			350	350		-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA			50	50			APBA	Dinsos, PMG, PPPA
3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi			0	0		-	-	-			0	0		-	-	-			0	0			-	-
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan			50	50		-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA			30	30		-	APBA	Dinsos, PMG, PPPA			20	20			APBA	Dinsos, PMG, PPPA

NO	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Pencapaian SPM 2025					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2026					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana	Pencapaian SPM 2027					Inisiasi	Sumber Pendanaan	Instansi Pelaksana
		Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran				Penerima Layanan Dasar	Realisasi	Mutu Layanan	Realisasi	Anggaran			
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
5	Pelayanan dukungan Psikososial			200	200	400,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			150	150	350,000,000	-	DAU	Dinsos, PMG, PPPA			150	150	350,000,000		DAU	Dinsos, PMG, PPPA

3.3 Integrasi SPM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di pasal 18 mengamanatkan bahwa Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Amanat dalam Undang-Undang ini merupakan bukti keseriusan pemerintah agar memperhatikan target yang ada dalam SPM menjadi prioritas pembangunan di daerah.

Dokumen perencanaan daerah bersifat sistematis dan berjenjang mulai dari RPJP, RPJM, RKPK, RENSTRA SKPK sampai ke penjabaran operasionalnya RENJA SKPK dan RKA SKPK. Sistematis ini dimaksudkan antar-dokumen saling terkait dan saling mempengaruhi. Satu sub sistem perencanaan berubah yang lain akan mengikuti perubahan, sedangkan berjenjang dimulai dari filsafat perencanaan jangka panjang yang dijadikan arahan untuk aksi implementasi di jangka pendek/tahunan. Untuk itu, Renaksi Penerapan SPM ini tidak hanya berakhir pada satu tatanan teks perencanaan saja, namun untuk mewujudkannya perlu proses integrasi pada tahapan dokumen perencanaan selanjutnya, sehingga Renaksi Penerapan SPM ini mampu berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka perlu ada integrasi dengan proses perencanaan berikutnya melalui:

1. Upaya pemenuhan SPM pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dipastikan menjadi isu strategis daerah, baik dalam perencanaan jangka panjang, jangka menengah maupun yang sifatnya tahunan.
2. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJM) dapat dilakukan pada saat perumusan:
 - a. Gambaran umum kondisi daerah, khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan pemenuhan dan pencapaian kebutuhan dasar oleh Pemerintah Daerah
 - b. Gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Permasalahan dan isu strategis daerah, khususnya dikaitkan dengan isu pemenuhan kebutuhan dasar untuk setiap Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
 - d. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah, khususnya dikaitkan dengan strategi Pemerintah Daerah dalam menyusun arah kebijakan dan merumuskan program dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan program Perangkat Daerah dan pendanaan yang diperuntukkan dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - f. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
3. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) dapat dilakukan pada saat perumusan:

- a. Gambaran umum kondisi daerah khususnya dikaitkan dengan penyelenggaraan dan pencapaian program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah, khususnya dikaitkan dengan besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah, khususnya untuk memastikan capaian pemenuhan kebutuhan dasar dalam rencanakerja tahunan.
 - d. Rencana kerja dan pendanaan daerah, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - e. Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
4. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan capaian dan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan permasalahan pokok yang dihadapi Perangkat Daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - c. Tujuan dan sasaran, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
 - d. Strategi dan arah kebijakan, khususnya dikaitkan dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, khususnya dikaitkan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.

- e. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, khususnya dikaitkan dengan indikator kinerja daerah dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
5. Integrasi rencana pemenuhan SPM pada dokumen Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan pada saat perumusan:
- a. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu, khususnya dikaitkan dengan upaya optimalisasi pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, khususnya dikaitkan dengan dengan program, kegiatan, dan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang disusun dalam pencapaian pemenuhan kebutuhan dasar.
6. Integrasi Renaksi Penerapan SPM Ke Dalam Penganggaran Daerah Integrasi SPM ke dalam perencanaan dan penganggaran juga termasuk sinkronisasi target SPM antar

dokumen perencanaan pembangunan (RPJM, RENSTRA, RKPK, RENJA) dioperasionalkan semua dokumen tersebut ke dalam RKA OPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPK) sebagai instrumen rencana pembangunan tahunan daerah selanjutnya melahirkan RAPBK yang setiap tahun disepakati bersama antara eksekutif dan legislatif. Dokumen penganggaran tahunan daerah meliputi:

- a. Kebijakan Umum APBK (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD;
- c. Rencana Kerja Anggaran (RKA) PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan PD sebagai dasar penyusunan APBK.

3.3.1. Integrasi Penerapan SPM Terhadap Dokumen Rencana Daerah

TABEL 3. 14
Urusan Pendidikan

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
1	Program SPM Pendidikan anak Usia Dini	Angka Partisipasi sekolah PAUD	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan unit sekolah baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan ruang kelas baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi sedang/berat Gedung/ ruang kelas/ ruang guru PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan perlengkapan peserta didik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan biaya personal peserta didik PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan tersedia bagi satuan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Literasi dan rumenerasi PAUD	Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Kualitas PAUD	Pembinaan kelembagaan dan manajemen PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi sedang/berat pembangunan sarana, prasarana dan utilitas PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan alat praktik dan peraga siswa PAUD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pertumbuhan pendidikan PAUD dengan S1/DIV	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Program SPM Pendidikan Dasar		Angka partisipasi Sekolah (SD/SMP)	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pembangunan unit sekolah baru		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pembangunan ruang kelas baru		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pengadaan perlengkapan peserta didik		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penyediaan biaya personal peserta didik sekolah dasar		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Literasi dan numerasi (SD/SMP)		Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Pendidikan dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/ PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembinaan penggunaan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) untuk pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelatihan penggunaan aplikasi bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan perlengkapan peserta didik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan alat praktik dan peraga peserta didik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Iklim (SD/SMP)	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
3	Program SPM Pendidikan Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah (Pendidikan Kesetaraan)	Koordinasi, perencanaan, supervisi dan evaluasi layanan di bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan unit sekolah baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan ruang kelas baru	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan perlengkapan peserta didik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan biaya personal peserta didik kesetaraan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Iklim (Kesetaraan)	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian layanan pendampingan bagi satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Sosialisasi dan advokasi kebijakan bidang Pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis, pelatihan dan/atau magang/PKL untuk peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Fasilitasi komunitas belajar pendidik dan tenaga kependidikan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 3.15
Urusan Kesehatan

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
1	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 3.16
Urusan Pekerjaan Umum

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
1	Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Permukiman	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Supervisi Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan/ Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
			Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 3.17
Urusan Perumahan Rakyat

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
1	Program pengembangan perumahan	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

		Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 3.18
Urusan Trantibum

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
1	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

			Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pengelolaan Satuan polisi pamong praja dan wilayahul hisbah aceh	Penyusunan program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Operasionalisasi penegakan, pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

			Penyuluhan dan sosialisasi qanun dan peraturan perundang-undangan syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Konsultasi, informasi dan instruksi terhadap polisi wilayahul hisbah kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Bimbingan teknis bagi polisi wilayahul hisbah aceh dan kabupaten/kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelaksanaan eksekusi cambuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Konsultasi dengan badan legislative, yudikatif, ulama dan instansi terkait dalam rangka pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberdayaan untuk penyelesaian qanun syariat islam yang bersifat non justisi bekerja sama dengan aparat gampong dan mukim	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengelolaan laporan dan pengaduan masyarakat serta penanganan pelanggaran qanun yang bersifat non justisi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Koordinasi dengan organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dan Lembaga swadaya masyarakat di bidang pembinaan dan pengawasan qanun syariat islam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyusunan Rencana Kontijensi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
		Pelayanan Penyelematan dan evakuasi korban bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Ada	Ada				Bencana ...

		Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Tabel 3.19
Urusan Sosial

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/PPAS	RKA
	Program Rehabilitas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan Permakanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penyediaan Sandang			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Penyediaan Alat Bantu			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat			Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Gelandangan ...

No	Indikator	Program Kegiatan	Sub Kegiatan	Dokumen Perencanaan					
				RPJM/RPD	Renstra	RKPD	Renja	KUA/ PPAS	RKA
			Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Layanan Kedaruratan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pemberian Layanan Rujukan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Sandang	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
			Pelayanan Dukungan Psikososial	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN SPM

4.1. Pemantauan dan Evaluasi SPM

Standar Pelayanan Minimal merupakan ketentuan mengenai Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Kota/Kota. Untuk memastikan bahwa target dan sasaran pemenuhan layanan Dasar SPM di daerah terpenuhi, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap triwulan.

Dalam hal ini kegiatan pemantauan lebih terfokus pada kegiatan yang akan dilaksanakan. Pemantauan dilakukan dengan cara menggali untuk mendapatkan informasi secara reguler berdasarkan indikator tertentu, dengan maksud mengetahui apakah kegiatan yang sedang berlangsung sesuai dengan perencanaan dan prosedur yang telah disepakati. Indikator pemantauan mencakup esensi aktivitas dan target yang ditetapkan pada perencanaan program. Apabila pemantauan dilakukan dengan baik akan bermanfaat dalam memastikan pelaksanaan kegiatan tetap pada jalurnya dan sesuai pedoman serta perencanaan program. Pemantauan tersebut diharapkan memberikan informasi kepada pengelola program apabila terjadi hambatan, penyimpangan dan masukan dalam melakukan evaluasi.

Secara prinsip, pemantauan dilakukan guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana, apakah tercapai atau tidak. Bila ditemukan penyimpangan atau kelambanan maka segera dibenahi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai rencana dan targetnya. Jadi, hasil ini akan menjadi input bagi kepentingan proses selanjutnya.

Fokus pelaksanaan pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian SPM adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, dalam hal perencanaan, pemantauan dilakukan untuk memastikan bahwa rencana program dan kegiatan yang akan diselenggarakan telah mendapatkan masukan dari berbagai pihak dan telah diketahui bersama-sama, sehingga konsep yang akan dilakukan terbuka.
2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan telah terlaksana dengan baik. Ukuran untuk pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan melihat tingkat ketepatan waktu pelaksanaan, penggunaan anggaran sesuai dengan yang direncanakan dan memastikan apakah pihak-pihak terkait pada awal perencanaan ikut berpartisipasi di dalamnya.
3. Penggunaan sumber daya, untuk memastikan apakah dalam penggunaan sumber daya sudah cukup baik. Dalam hal ini pemantauan sumber daya dapat dilakukan dengan menggunakan indikator sumber daya manusia yang ditetapkan dalam perencanaan dapat menjalankan tugasnya atau tidak. Berbagai perlengkapan dan peralatan yang menunjang kegiatan apakah digunakan dengan baik, tidak ada pemborosan atau penggunaan berlebihan.
4. Penyampaian perkembangan hasil, pemantauan dilakukan dengan memastikan bahwa pada setiap unit yang diberikan tanggung jawab selalu memberikan laporan rutin kepada pimpinan unitnya sebagai penanggung jawab pelaksanaan program dan kegiatan. Waktu dan

media pelaporan menjadi kesepakatan bersama dan dijadikan sebagai bukti pada saat pelaksanaan pemantauan.

5. Pelaku kegiatan, apakah masing-masing penanggung jawab kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan. Pemantauan dilakukan untuk memastikan apakah pihak terkait telah dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain kelompok masyarakat, LSM, instansi antar pemerintah, donor, dan lainnya sesuai yang disepakati.

Adanya pelaksanaan pemantauan ini memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol Penerapan SPM yang mempunyai empat fungsi, yaitu:

- a. Ketaatan/*compliance*, pemantauan menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Pemeriksaan/*auditing*, pemantauan menetapkan apakah sumber dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
- c. Laporan/*accounting*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- d. Penjelasan/*explanation*, pemantauan menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak cocok.

Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan, untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama di waktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap pencapaian SPM di Kota Sabang, maka indikator utama yang digunakan adalah indikator SPM itu sendiri yang ada pada masing-masing urusan, dengan membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditentukan sebesar 100% dengan kategori tercapai atau tidak. Jika target indikator dalam SPM tidak tercapai, maka dapat di crosscheck apa penyebab tidak tercapai. Ini dapat dilakukan dengan memeriksa kembali apa yang direncanakan baik dari sisi kegiatan, anggaran maupun sasaran sudah terlaksana semua atau tidak. Perkiraan tidak tercapai juga sebenarnya sudah dapat terdeteksi berdasarkan hasil Pemantauan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perlu melakukan identifikasi kemungkinan terhadap permasalahan, antara lain:

- a. Kebijakan Daerah. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek kebijakan antara lain:
 1. Apa saja kebijakan daerah yang terkait secara langsung maupun tidak dalam pelaksanaan SPM?
 2. Apakah kebijakan daerah mendukung atau sebaliknya malah menghambat pemberian layanan dasar kepada masyarakat?
 3. Adakah di antara kebijakan yang dibuat Pemda bertentangan dengan kebijakan atau regulasi di atasnya?
 4. Sumber Daya Manusia (SDM) Pelaksana Layanan Dasar. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek SDM antara lain:

5. Berapa jumlah SDM pemberi layanan dasar pada masing-masing bidang SPM?
 6. Bagaimana kualifikasi SDM pelaksana layanan yang dimiliki, apakah sudah sesuai standar teknis atau b Bagaimana ... banyak jumlah SDM pada masing-masing kategori tersebut?
 7. Bagaimana daerah merespon permasalahan pada aspek SDM untuk memastikan pelayanan dasar terberikan kepada seluruh warga negara calon penerima dengan standar mutu minimal sesuai perundangan?
 8. Jika dibutuhkan pelatihan untuk peningkatan SDM, pelatihan apa yang paling dibutuhkan dan berapa SDM yang akan dilibatkan?
- b. Koordinasi, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek koordinasi antara lain:
1. Apakah tim penerapan SPM telah terbentuk?
 2. Bagaimana pola koordinasi antar lembaga pengampu perencanaan dan penganggaran, pengadministrasian pembangunan, dan perangkat daerah pelaksana pelayanan dasar (SPM) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Apakah di sektor koordinasi level ini masih terdapat masalah? Apa saja masalah utama yang timbul? Dan apa alternatif solusi yang mungkin dilakukan?
 3. Jika ada kerjasama daerah yang dilakukan dalam melaksanakan pemenuhan SPM, apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 4. Bagaimana hubungan antar level pemerintahan (daerah dan pusat) dalam menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? apakah ada masalah di level koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 5. Bagaimana hubungan Pemda dengan lembaga nonpemerintah yang memberikan layanan dasar (SPM) di daerah? apakah ada masalah di level hubungan lintas kelembagaan dan koordinasi? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
- c. Manajemen Kerja, Beberapa pertanyaan dasar pada aspek manajemen kerja antara lain:
1. Apakah terdapat masalah di level manajemen kerja untuk menerapkan dan melaksanakan pemenuhan SPM? Jika ada, apa masalah utama dan bagaimana persoalan itu dapat diatasi?
 2. Terkait proses penerapan SPM mulai dari pembentukan tim penerapan, proses pendataan, penghitungan kebutuhan, perencanaan, sampai dengan pelaksanaan SPM, apa ada problem manajemen yang membuat penerapan SPM jadi terhambat?
 3. Dalam hal teknis pekerjaan kegiatan sarana dan prasarana SPM, apa masalah utama yang dihadapi? Apakah lelang pekerjaan masih jadi salah satu masalah? Atau apa masalah paling utama di sektor ini dan bagaimana persoalan tersebut dapat diatasi?
- d. Pendanaan. Beberapa pertanyaan dasar pada aspek pendanaan antara lain:
1. Apakah Pemda memiliki kapasitas pendanaan yang memadai

untuk ...

- untuk melaksanakan pemenuhan SPM bagi seluruh calon penerimanya?
2. Bagaimana Pemda menyusun strategi dan membuat pola pendistribusian alokasi anggaran untuk tiap bidang SPM? apakah ada pengutamakan dan prio pendistribusian ... periodisasi tahun anggaran?
 3. Atau apakah pendanaan SPM diberikan kepada seluruh bidang secara paralel, bergantung penghitungan kebutuhan anggaran tiap layanannya? Sebaliknya, ataukah penghitungan kebutuhan anggaran tidak menjadi patokan dalam pengalokasian anggaran tiap bidang SPM? perangkat daerah kemudian mencocokkan distribusi anggaran kepada tiap layanan berdasarkan alokasi yang ditetapkan?
 4. Bagaimana kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat dalam melaksanakan pemenuhan SPM? Bagaimana proporsinya jika dibandingkan dengan APBD murni dalam memenuhi target pelaksanaan SPM? Terkait dana transfer ini, bidang SPM apa yang dirasa membutuhkan dukungan anggaran paling besar? Dan mengapa?
 5. Apakah ada sumber dana nonpemerintah yang dimanfaatkan oleh
 6. Pemda dalam memenuhi pemberian layanan (SPM) kepada warganya?
 7. Jika ada, dari instansi mana saja dan berapa besar anggaran nonpemerintah yang dimanfaatkan, serta berimbas pada berapa banyak warga yang terlayani?
 8. Jika dapat dihitung proporsi pelayanan layanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemda dan lembaga nonpemerintah, berapa besar pelayanan dasar kepada masyarakat yang diberikan oleh masing- masing lembaga? Lalu berapa total cakupan layanan kepada masyarakat dengan menghitung kontribusi dari keduanya?

Evaluasi pencapaian indikator SPM dilakukan dengan menggunakan tabel dasar yang ada dalam Rencana Aksi sebagai berikut:

Tabel 4.1 Evaluasi Pencapaian indikator SPM

No	Jenis Pelayanan Dasar	Mutu Layanan Dasar	Indikator SPM	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian	Permasalahan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Penilaian terhadap Evaluasi merupakan tahapan yang berkaitan erat dengan kegiatan pemantauan, karena kegiatan evaluasi dapat menggunakan data yang disediakan melalui kegiatan pemantauan. Dalam merencanakan suatu kegiatan hendaknya evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sehingga dapat dikatakan sebagai kegiatan yang lengkap. Evaluasi diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol ketercapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi ini berdekatan dengan penafsiran, pemberian angka dan penilaian.

Dengan demikian, pemantauan dan evaluasi dibuat dengan tujuan sebagai media untuk belajar dari pengalaman, maka pada prinsipnya

semakin banyak pihak yang melakukan pemantauan dan evaluasi akan semakin membaik. Namun demikian, stakeholder terkait yang paling merasakan dampak program yang harus menjadi pengendali proses pemantauan dan evaluasi dan berhak menentukan siapa saja yang perlu dilibatkan.

4.2. Pelaporan Pelaksanaan Renaksi Penerapan SPM

Mengacu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Gubernur, Wali Kota. Wali Kota menyampaikan laporan SPM secara triwulan melalui aplikasi berbasis web (e-SPM): <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.

Analisis capaian SPM mengacu pada materi utama pencapaian SPM dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, dilakukan terhadap capaian Penerapan SPM, anggaran yang dialokasikan oleh daerah dan permasalahan dalam usaha pemenuhan SPM.

- a. Indeks Pencapaian SPM. Bagian ini akan menganalisis gap Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Analisis gap atas identifikasi dari kondisi eksisting dan target pemenuhan Indeks Pencapaian pada tiap tahun penerapan SPM;
 2. Capaian target dianalisis dengan melihat capaian hasil pelaksanaan;
 3. SPM atas target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
- b. Anggaran SPM. Bagian ini akan menganalisis alokasi anggaran pada tiap Penerapan SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Bagaimana menyusun prioritas anggaran pembangunan?
 2. Bagaimana SPM diposisikan?
 3. Berapa alokasi anggaran pada tiap bidang SPM? Apakah anggaran SPM yang dialokasikan sesuai dengan penghitungan kebutuhan dan dapat menjawab permasalahan utama SPM?
 4. Apakah alokasi yang diberikan cukup untuk memastikan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM terhadap penerima layanan dan mutu layanan, terutama dalam mencapai target *output* pada tiap kegiatan pemenuhan SPM?
 5. Dengan memilah alokasi SPM pada program, kegiatan dan sub kegiatan, berapa proporsi anggaran utama dan pendukung pada tiap bidang SPM?
- c. Permasalahan SPM. Bagian ini akan menganalisis permasalahan dalam melaksanakan penerapan dan pemenuhan Indeks Pencapaian SPM dengan menganalisis terfokus terhadap:
 1. Mengapa terdapat gap dalam pemenuhan SPM di daerah?
 2. Apa saja permasalahan yang dihadapi dalam tiap tahapan penerapan SPM?
 3. Mengapa masalah tersebut terjadi dan apa solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut?

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil Evaluasi bermanfaat bagi rencana pelaksanaan program yang sama diwaktu dan tempat lainnya. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah program itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai terhadap output. Evaluasi bisa dilakukan jika program itu telah berjalan setidaknya dalam suatu periode sesuai dengan tahapan Penerapan SPM.

Capaian pada tiap bidang SPM di Kota Sabang masih rendah diakibatkan belum terintegrasinya SPM ke dalam Dokumen Perencanaan Daerah. Rencana aksi penerapan SPM menjadi strategi dalam pencapaian pemenuhan SPM, memuat terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan, penerima dan mutu layanan dasar serta sumber pendanaan yang merupakan komitmen pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan SPM selama 5 tahun ke depan.

5.2. Saran

1. Perlu sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 dan Permendagri 59 Tahun 2021, untuk pemahaman terhadap kewenangan pemenuhan pencapaian SPM di Kota Sabang.
2. Perlu penguatan tim penerapan SPM Kota Sabang berkaitan dengan nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya yaitu Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021.
3. Tim penerapan SPM Kota Sabang secepatnya mengoordinasikan rencana aksi daerah yang diprakarsai oleh bagian tata pemerintahan, guna pemenuhan SPM dan memastikan ketersediaan anggaran pemenuhan Pelayanan Dasar dalam APBD setiap tahun melalui perencanaan dan penganggaran.
4. Perlu bimbingan kepada tim penerapan SPM dalam pelaporan SPM sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pelaporan secara triwulanan yang di laporkan ke dalam Aplikasi e-SPM yaitu: <https://spm.bangda.kemendagri.go.id>.
5. Perlu adanya skema pembiayaan yang mendukung Penerapan SPM melalui Kerjasama *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian Rencana Aksi Penerapan SPM ini dibuat, semoga bermanfaat untuk percepatan penerapan dan peningkatan Indeks pencapaian SPM di Kota Sabang.

